



# LAPORAN TAHUNAN

## Tahun Anggaran 2022

**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK**

## KATA PENGANTAR

Atas rahmat dan karunia Tuhan yang Maha Esa, sehingga Laporan Tahunan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk publikasi kinerja yang menggambarkan hasil kegiatan dan capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, baik yang bersifat teknis maupun administratif.

Dengan adanya publikasi ini diharapkan dapat diidentifikasi masukan-masukan yang berguna bagi pengembangan program kegiatan demi peningkatan kontribusi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam program pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha Badan POM di masa mendatang. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan unit baru yang ada di tahun 2021, yang dibentuk berdasar Peraturan Badan POM nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM. Bekerja dalam kondisi Tatanan Normal Baru menuntut kami untuk terus berinovasi sehingga tetap dapat menghasilkan kinerja yang optimal.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara konsisten melakukan *continuous improvement* di berbagai bidang antara lain meningkatkan kualitas pelayanan publik, optimalisasi sumber daya, penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia dan peningkatan akuntabilitas kinerja sebagai implementasi program reformasi birokrasi pemerintah yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik menuju *good governance* dan *clean government*. Upaya Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berperan dalam pemberdayaan masyarakat dengan program Badan POM *Goes to School/Campus* untuk obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik aman serta pemberdayaan pelaku usaha dengan pendampingan *start up*, UMKM Obat Tradisional dan UMKM Kosmetik.

Terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dan semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

Jakarta, 15 Maret 2023

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha  
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Dra. Asih Liza Restanti, Apt., M.Kes.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	vi
Dafar Grafik	vii
Daftar Lampiran	viii
Highlight	1
Bab I Pendahuluan	6
A. Gambaran Umum Institusi	6
B. Struktur Organisasi dan Tupoksi	7
Bab II Pengelolaan Sumber Daya	12
A. Sumber Daya Manusia	12
B. Sarana dan Prasarana	15
C. Anggaran	15
Bab III Hasil Kegiatan	16
Bab IV Penutup	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
Lampiran	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	7
Gambar 3.1	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat per triwulan tahun 2022	17
Gambar 3.2	Rapat Penyusunan Petunjuk Teknis Pemilihan Duta Jamu/Kosmetika Aman pada tanggal 20 Januari 2022 di Hotel Grand Mercure	21
Gambar 3.3	ToT dan Pembentukan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat UPT BPOM	22
Gambar 3.4	Pembentukan Duta Kosmetik dan Jamu Aman oleh Fasilitator di UPT BPOM	23
Gambar 3.5	Pembekalan dan Pelatihan Tata Rias oleh Narasumber dari Yayasan Putri Indonesia (YPI)	24
Gambar 3.6	Sosialiasi Petunjuk Teknis Pemilihan Duta Jamu/Kosmetika Aman	24
Gambar 3.7	Duta Kosmetik dan Duta Jamu Aman melakukan KIE kepada komunitas masyarakat	25
Gambar 3.8	Kegiatan Pembentukan Penyuluh Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Aman di Jawa Tengah	26
Gambar 3.9	Dashboard Laporan BPOM Goes to School/Campus/Community pada BPOM Operational Center di bulan Desember 2022	27
Gambar 3.10	Advokasi tentang Pendampingan Pembentukan Sentra UMKM Garam Kosmetik di Mataram	28
Gambar 3.11	Advokasi tentang Eksplorasi Obat Bahan Alam dan TTK di Jawa Tengah	29
Gambar 3.12	Sinergitas Lintas Sektor Dalam Rangka Pendampingan UMKM Obat Tradisional di Kendari	31
Gambar 3.13	Rapat Sinergitas bersama Ditjen Dikti, Kemendikbudristek	33
Gambar 3.14.	Rapat Koordinasi Lanjutan bersama Badan Standar, Kurikulum, dan Assessment Pendidikan , Kemendikbudristek	34
Gambar 3.15	Penandatanganan PKS oleh Sestama Badan POM dengan Plt Dirjen Diktiristek	34
Gambar 3.16	Rapat Sinergitas bersama Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi di Jakarta	35

Gambar 3.17	FGD Sinergitas bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Dukungan Program BPOM Goes to Community	36
Gambar 3.18	Rapat dalam rangka Jamu Goes to UNESCO untuk Pembudayaan Jamu	37
Gambar 3.19	Advokasi dalam rangka Pilot Project Kolaborasi Program Badan POM Goes to School dengan Magang Kerja Mahasiswa di Bengkulu	38
Gambar 3.20	Kick Off dan Training of Trainer pada tanggal 15-16 Maret 2022 di Hotel Margo, Depok	44
Gambar 3.21	Paparan Monitoring dan Evaluasi Pendampingan UMKM Kosmetik TW IV pada tanggal 29 November 2022	45
Gambar 3.22	Pendampingan secara on site ke sarana UMKM OT di Kupang	48
Gambar 3.23	Desk konsultasi pelaku usaha Obat Tradisional di Kendari	49
Gambar 3.24	Pendampingan secara on site ke sarana UMKM Srikandi, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara	49
Gambar 3.25	Pendampingan On Site ke sarana KUD Sarasah, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat	50
Gambar 3.26	Kegiatan Forum Koordinasi Pendampingan UMKM Obat Tradisional di Kabupaten Tanah Datar dan Sekitarnya	51
Gambar 3.27	Finalisasi Petunjuk Teknis untuk Fasilitator UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik	52
Gambar 3.28	Pelatihan Fasilitator Pendampingan UMKM Obat Tradisional	53
Gambar 3.29	Rapat Monitoring dan Evaluasi Pendampingan UMKM Obat Tradisional oleh Fasilitator UPT Badan POM	53
Gambar 3.30	Kegiatan Sharing Knowledge Orang Tua Angkat Sesi 1-5 yang dilaksanakan secara hybrid	54
Gambar 3.31	Kegiatan Webinar BISA UMKM Sesi 1-2 yang di laksanakan secara hybrid	55
Gambar 3.32	Focus Group Discussion (FGD) Penggalan Informasi Empiris Bahan Alam Di Seluruh Indonesia Dengan Melibatkan Unsur Pentahelix tanggal 16 Juni 2022	57
Gambar 3.33	Penggalan Informasi Empiris Bahan Alam Berdasarkan Kearifan Lokal Dengan Melibatkan Unsur Pentahelix di Kota Medan, Tanggal 7 Juli 2022	57
Gambar 3.34	Penggalan Informasi Empiris Bahan Alam Berdasarkan Kearifan Lokal Dengan Melibatkan Unsur Pentahelix di Kota Makassar, Tanggal 11 Juli 2022	57

Gambar 3.35	Penggalian Informasi Empiris Bahan Alam Berdasarkan Kearifan Lokal Dengan Melibatkan Unsur Pentahelix di Manado, Tanggal 20 Oktober 2022	57
Gambar 3.36	Penggalian Informasi Empiris Bahan Alam Berdasarkan Kearifan Lokal Dengan Melibatkan Unsur Pentahelix di Kota Kendari, tanggal 22 Juli 2022	57
Gambar 3.37	Paparan materi dari Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	58
Gambar 3.38	Peserta Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Kosmetik yang hadir secara luring	58
Gambar 3.39	Pembahasan usulan Draft MoU Badan POM dengan KKP di Bekasi	59
Gambar 3.40	Pembahasan lanjutan Draft MoU Badan POM dengan KKP di Jakarta	59
Gambar 3.41	Kegiatan KIE Tomas	61
Gambar 3.42	Penilaian UPP Dit. PMPU OTSKK Tahun 2022	62
Gambar 3.43	Sinergitas bersama Orsosmas dan Profesi di Semarang	65
Gambar 3.44	Internalisasi Meraih WBK/WBBM di Dit. PMPU OTSKK	66
Gambar 3.45	Sosialisasi Anti Gratifikasi di Dit. PMPU OTSKK	67
Gambar 3.46	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai	69
Gambar 3.47	Pelaksanaan System Integration Testing (SIT) pada tanggal 15 Agustus 2022 di Bogor	70
Gambar 3.48	User Acceptance Testing (UAT) pada tanggal 20 September 2022 di Mataram	71

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat per triwulan Tahun 2022	16
Tabel 3.2 Duta Kosmetik Aman Terbaik Nasional	25
Tabel 3.3 Duta Jamu Aman Terbaik Nasional	25
Tabel 3.4 Fasilitator UPT Program Badan POM Goes to School	44
Tabel 3.5 Data UMKM OT yang memenuhi standar tahun 2022	46

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Komposisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan	12
Grafik 2.2 Profil SDM berdasarkan Jabatan Total 32 Pegawai	13
Grafik 2.3. Profil SDM berdasarkan Umur	13
Grafik 2.4 Kebutuhan SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021 berdasarkan Analisis Beban Kerja	14

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	76
Lampiran 2	Capaian Kinerja per Sasaran Strategis Tahun 2022	77
Lampiran 3	Hasil pemantauan peningkatan kompetensi minimal 20 JP pegawai tahun 2022	79
Lampiran 4	Rekap Barang Milik Negara Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021	80

## HIGHLIGHT KEGIATAN

### MARET

#### Pendampingan UMKM Obat Tradisional dalam rangka Mendukung Hilirisasi Herbal Nasional melalui Konsistensi Pemenuhan Mutu Bahan Baku

Jawa Tengah merupakan salah satu sentra usaha jamu terbesar di Indonesia yang tersebar di beberapa wilayah antara lain Semarang, Surakarta, Sukoharjo, Tegal, Klaten, dan Boyolali. Sebagian besar usaha jamu ini merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha jamu atau obat tradisional memiliki potensi dikembangkan dan bersaing dengan produk impor, sehingga diperlukan dukungan berbagai pihak untuk meningkatkan daya saing produk jamu dan obat tradisional termasuk usaha jamu gendong di Indonesia.

Dukungan terhadap potensi daerah ini harus dioptimalkan seiring meningkatnya minat masyarakat untuk *back to nature* dengan mengonsumsi jamu. Untuk itu, Badan POM dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah bersinergi mewujudkan rangkaian kegiatan “Pendampingan UMKM Obat Tradisional dalam rangka Mendukung Hilirisasi Herbal Nasional Melalui Konsistensi Pemenuhan Mutu Bahan Baku” di Semarang, Kamis (31/03/2022)

Rangkaian kegiatan ini merupakan hasil koordinasi dan tindak lanjut kerja sama antara Badan POM dengan Komunitas Empu dan Yayasan Benih Baik dalam peningkatan keamanan dan mutu produk jamu dan pangan olahan. Badan POM juga menggandeng Industri Obat Tradisional melalui program Orang Tua Angkat Jamu untuk meningkatkan daya saing UMKM termasuk jamu gendong.



Badan POM terus meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan melalui berbagai strategi untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Sampai saat ini, berdasarkan hasil pengawasan Badan POM, masih ditemukan beberapa produk obat tradisional dan pangan yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Untuk itulah, Badan POM secara aktif terus melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman serta memberikan pendampingan dalam rangka pemberdayaan UMKM dan usaha jamu gendong yang berdaya saing

## Pilot Project Lombok Timur sebagai Sentra UMKM Garam Kosmetik

Lombok Timur dipilih sebagai pilot project karena Lombok Timur memiliki sumber daya alam garam yang berlimpah. Berdasarkan Sumber daya alam garam yang melimpah tersebut, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengupayakan untuk mendorong UMKM Garam Konsumsi untuk



mengembangkan produknya menjadi Garam Kosmetik. Hal ini dilakukan sebagai peran nyata BPOM dalam memulihkan ekonomi masyarakat Lombok akibat dampak pandemi Covid-19 sekaligus memberikan peluang usaha ekonomi kerakyatan masyarakat Lombok, terutama untuk menyambut event internasional motoGP pada bulan Maret 2022 di Lombok. Selain itu, BPOM mengharapkan Kabupaten Lombok Timur dapat menjadi salah satu destinasi wisata karena garam kosmetik di Lombok.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah pendampingan UMKM Garam di Lombok Timur dalam rangka memperoleh sertifikasi CPKB dan Nomor Notifikasi. Pada tanggal 19 Januari 2022 telah dilakukan kunjungan kepada 2 (dua) sarana UMKM Garam yang ingin mengembangkan usahanya untuk memproduksi garam kosmetik, yaitu Koperasi Dende Ringgit dan UD. Sende Maju

## JULI

### Advanced Training Duta Jamu Aman dan Duta Kosmetik Aman dalam program Badan POM Goes to School & Badan POM Goes to Campus



Badan POM *Goes to School* dan Badan POM *Goes to Campus* merupakan program pemberdayaan masyarakat yang diperuntukan bagi pelajar dan mahasiswa agar mampu menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih dan menggunakan obat tradisional dan kosmetika yang aman. Kegiatan ini telah diresmikan tanggal 15 Maret 2022 lalu oleh

Kepala Badan POM untuk pembentukan Duta Jamu Aman dan Duta Kosmetik Aman yang pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM seluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan peserta kegiatan sebagai Duta, Badan POM menggelar kegiatan “*Advanced Training Duta Jamu Aman dan Duta Kosmetik Aman* dalam program *Badan POM Goes to School & Badan POM Goes to Campus Tahun 2022*” pada 13-14 Juli 2022. Kegiatan ini diikuti oleh 249 Duta Badan POM terbaik yang terdiri dari 213 Duta Kosmetik Aman dan 36 Duta Jamu Aman dari seluruh Indonesia.

Dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ini, para duta diberikan berbagai pembekalan dari berbagai narasumber. Di hari pertama, peserta mendapatkan materi tentang berbagai keahlian dari pakar dan *influencer* yang menunjang *softskill* para peserta dalam melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Adapun pada hari kedua, materi difokuskan pada peran dan tugas masing-masing duta dalam melakukan KIE di komunitasnya, yaitu sebagai Duta Kosmetik Aman atau Duta Jamu Aman.



Melalui kegiatan *Advanced Training Duta* ini, diharapkan terbangun kolaborasi lintas sektor dan kemitraan dengan Duta Jamu Aman dan Duta Kosmetik Aman Badan POM sebagai bagian dari peran serta masyarakat di dalam mendukung sistem pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman

## SEPTEMBER

### Webinar Nasional Tenaga Teknis Kefarmasian BerSeri (Jilid 1 dan 2)

Untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian di bidang perizinan Obat Tradisional dan Kosmetik, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik melaksanakan Webinar Nasional Tenaga Teknis Kefarmasian BerSeri. Acara ini dilaksanakan dalam dua rangkaian, yaitu Webinar Jilid I (1-2 September 2022) dan Webinar Jilid II (6-7 September 2022)



Acara dilaksanakan secara daring dengan peserta dari berbagai latar belakang, antara lain Perguruan Tinggi dan Sekolah Vokasi Farmasi di seluruh Indonesia, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia (APDFI), Lintas Sektor (Pusat dan Daerah), Badan POM dan UPT Badan POM, Pelaku Usaha Obat Tradisional dan Kosmetik, dan Tenaga Teknis Kefarmasian di seluruh Indonesia

Dengan diadakannya webinar ini, diharapkan dapat membantu ketersediaan akan kebutuhan TTK yang kompeten bagi UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik sehingga meningkatkan peredaran produk Obat Tradisional dan Kosmetik yang legal, unggul, serta mampu berdaya saing di pasar lokal, nasional, dan internasional

## OKTOBER

### Kunjungan Desa Wisata Jamu sebagai Upaya Inovasi dan Literasi Berbasis Desa

*Health tourism* atau wisata kesehatan menjadi salah satu daya tarik unggulan wisatawan di sejumlah negara. Wisata kesehatan adalah kegiatan wisata yang mengedepankan peningkatan kesehatan, kebugaran fisik, sekaligus pemulihan kesehatan spiritual dan mental wisatawan. Selain keanekaragaman tradisi dan budaya, Indonesia juga memiliki kekayaan herbal yang bisa dijadikan bahan terapi, obat atau jejamuan untuk pelayanan kesehatan tradisional.

Wisata kesehatan merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan tradisional yang memiliki potensi untuk pengembangan wisata kesehatan yang mengedepankan peningkatan kesehatan dan kebugaran fisik serta pemulihan kesehatan spiritual dan mental wisatawan.



Pengembangan wisata kesehatan di Indonesia akan terus dilakukan sebagai salah satu upaya memulihkan perekonomian nasional.

Wisata kesehatan di Indonesia terdiri dari beberapa bagian di dalamnya seperti wisata medical tourism dan herbal tourism. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan konsep herbal tourism mengingat Indonesia dikenal memiliki ribuan tanaman herbal dan rempah yang kerap digunakan untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan penyembuhan.



Sehubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh UMKM Obat Tradisional, diperlukan koordinasi integrasi program, kolaborasi, inventarisasi dan persamaan persepsi antara semua pemangku kepentingan sehingga dapat tercipta sinergisme dalam mengatasi permasalahan UMKM Obat Tradisional.

Kegiatan Kunjungan Ke Desa Wisata Jamu merupakan rangkaian kegiatan pada Rapat Koordinasi Pembudayaan Literasi, Inovasi dan Kreativitas Berbasis Desa dan Gerakan Aksi Nyata Penanaman Pohon sebagai Aksi Nyata dari Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, diselenggarakan di Kabupaten Magelang pada tanggal 12 - 14 Oktober 2022 dengan melibatkan 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga, yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perpustakaan Nasional, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Kunjungan ke Desa Wisata Jamu diselenggarakan Dusun Wisata Jamu Kiringan, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu, 12 Oktober 2022. Sambutan disampaikan oleh Bupati Bantul, Bapak H. Abdul Halim Muslih dan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Ibu Dra. Reri Indriani, Apt., MSi.



Program Kunjungan Ke Desa Wisata Jamu Kiringan, Yogyakarta merupakan kolaborasi antara Badan POM, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Orang Tua Angkat Jamu (PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.) dan calon orang tua angkat jamu (PT. Kimia Farma) yang sudah memberikan kontribusi dalam pendampingan usaha jamu gendong melalui program orang tua angkat jamu. Kontribusi orang tua angkat jamu yang sudah diberikan antara lain:

- a. Perbaikan pendopo
- b. Pengadaan LCD proyektor dan layar
- c. Perbaikan etalase kaca untuk display jamu
- d. Perbaikan laboratorium taman tanaman obat
- e. Penambahan jumlah tanaman obat
- f. Pengadaan papan nama tanaman obat
- g. Mesin Coding Cetak Tanggal Kemasan Jamu
- h. Mesin Continuous Band Sealler
- i. Sound System Wireless
- j. Pengadaan spanduk, umbul-umbul, produk jamu untuk isi goody bag, dan lain-lain.

## NOVEMBER

### Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Kemendikbudristek

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan POM dengan Kemendikbud Ristek RI nomor KS.01.01.1.2.10.21.15 dan nomor 15/X/NK/2021 tanggal 19 Oktober 2021, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mengadakan rangkaian kegiatan/rapat sinergisitas dengan Kemendikbudristek. Rangkaian acara tersebut membahas kelanjutan integrasi antara Program Badan POM Goes to School/Campus dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait

Pada tanggal 20 Mei 2022, Rapat Koordinasi Lanjutan bersama Badan Standar, Kurikulum, dan *Assessment* Pendidikan menghasilkan beberapa poin penting yang salah satunya adalah perlunya dibuat Perjanjian Kerjasama dengan Badan Standar, Kurikulum, dan *Assessment* Pendidikan yang membawahi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran terkait integrasi kurikulum. Hal ini merupakan keputusan bagian dari proses integrasi program Badan POM Goes to School/Campus untuk Duta Jamu dan Kosmetik Aman dalam kurikulum Kampus Merdeka Belajar.



Pada tanggal 25 Oktober 2022 dilakukan rapat finalisasi draft perjanjian kerjasama antara tim Badan POM yang terdiri dari Biro KSH, Dit. PMPU OTSKK, Dit. PMPU PO dengan Biro Hukor Ditjendiktiristek secara online. Menindaklanjuti hal tersebut, Kedua pihak menjadwalkan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Badan POM dan Kemendikbudristek pada tanggal 2 November 2022. Perjanjian Kerjasama dilakukan secara *desk to desk* antara Sekretaris Utama sebagai wakil dari Badan POM dan Plt. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sebagai wakil dari Kemendikbudristek.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Institusi

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan unit yang resmi beroperasi sejak Februari 2021 berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM.

#### 1. Visi

Dalam menghadapi dinamika lingkungan dengan segala bentuk perubahannya, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengacu pada visi Badan POM di mana segenap jajaran bercita-cita untuk mewujudkan suatu keadaan ideal bagi masyarakat Indonesia, yaitu :

**"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"**

#### 2. Misi

- 1) Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Memfasilitasi percepatan Pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

#### 3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

Badan POM memiliki 6 (enam) budaya kerja yang disingkat dalam akronim PIKKIR, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Profesional  
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi
- 2) Integritas  
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
- 3) Kredibilitas  
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional
- 4) Kerjasama Tim  
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- 5) Inovatif  
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- 6) Responsif/Cepat Tanggap  
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

## B. Struktur Organisasi dan Tupoksi

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara struktural di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan gambar sebagai berikut:



**Gambar 1.1** Struktur Organisasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- 4) pelaksanaan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah di bidang pengawasan obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- 6) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan
- 7) pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional berdasar dengan pengelompokan uraian fungsi sebagai berikut berdasar Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyisihan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi pemerintah daerah dan pemberdayaan komunitas sosial dan kemasyarakatan di bidang obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik serta tata operasional meliputi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan administrasi penjaminan mutu direktorat;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan meliputi pendampingan pengembangan bahan obat tradisional dan pendampingan usaha mikro kecil dan menengah obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan; dan
- 3) Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan meliputi pendampingan pengembangan bahan alam kosmetik dan pendampingan usaha mikro kecil dan menengah kosmetik

Adapun pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terdiri atas:

- 1) Kelompok substansi peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat di bidang obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik, terdiri atas:
  - a) Subkelompok substansi peningkatan peran pemerintah daerah;
  - b) Subkelompok substansi pemberdayaan komunitas sosial dan kemasyarakatan;

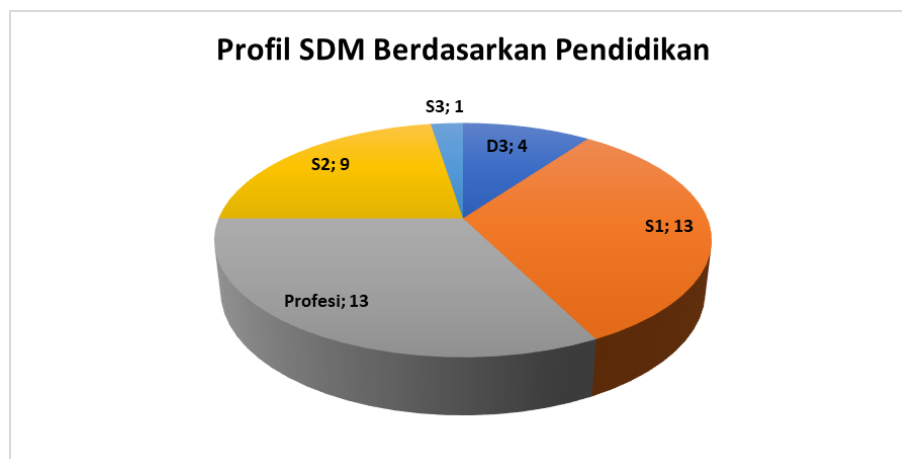
- 2) Kelompok substansi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, terdiri atas:
  - a) Subkelompok substansi pendampingan pengembangan bahan obat tradisional; dan
  - b) Subkelompok substansi pendampingan usaha mikro kecil dan menengah obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan.
- 3) Kelompok substansi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah kosmetik, terdiri atas:
  - a) Subkelompok substansi pendampingan pengembangan bahan alam kosmetik; dan
  - b) Subkelompok substansi pendampingan usaha mikro kecil dan menengah kosmetik.
- 4) Kelompok substansi tata operasional

## BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA

### A. Sumber Daya Manusia

1. Data Kepegawaian (berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, dan usia)

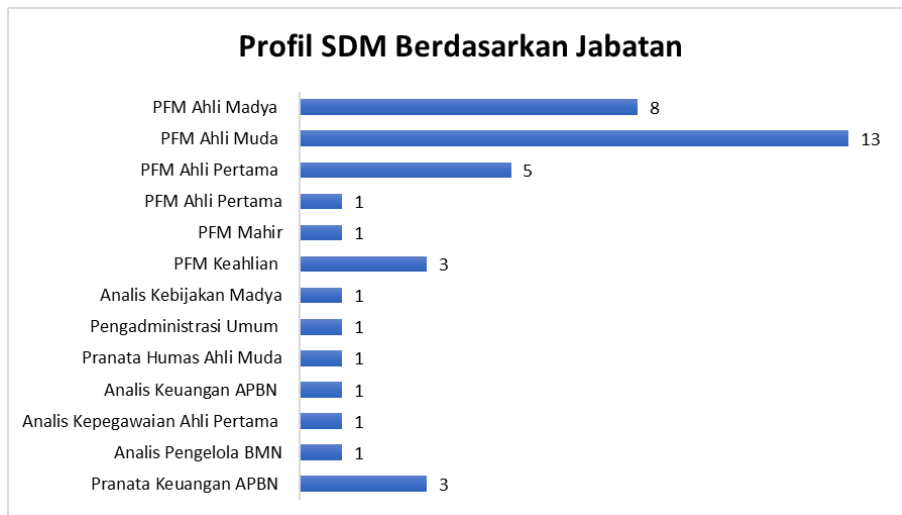
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai. Pada tahun 2022 jumlah total pegawai ASN di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebanyak 40 pegawai. Semua pegawai memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dan menduduki jabatan sesuai dengan pendidikan masing-masing. Adapun komposisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut.



**Grafik 2.1** Komposisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar. Pada tahun 2022, 1 (satu) orang telah menyelesaikan tugas belajar setingkat S2, 1 (satu) orang masih menjalani tugas belajar setingkat S2, dan 1 (satu) orang masih menjalani tugas belajar setingkat S1.

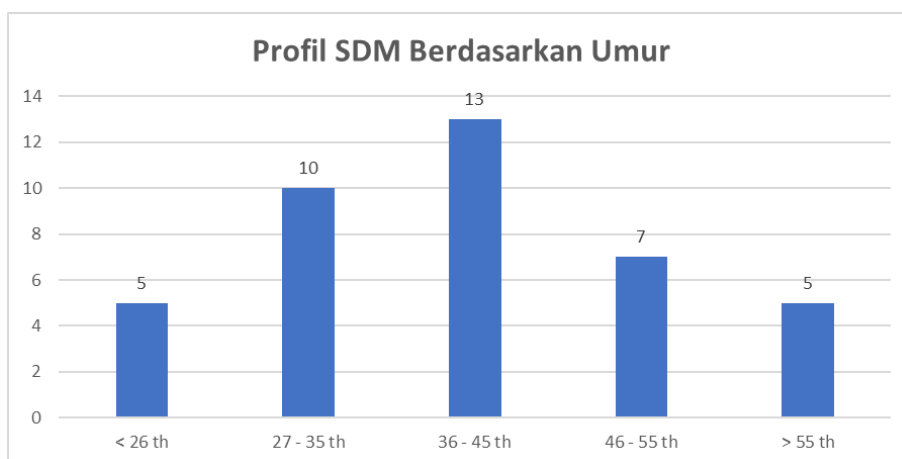
Dengan tingkat dan latar belakang yang berbeda membuat jabatan pegawai Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik juga beragam. Meskipun begitu, jabatan tersebut telah diberikan kepada pegawai sesuai dengan jenjang dan pendidikan yang telah ditempuh oleh pegawai



**Grafik 2.2** Profil SDM berdasarkan Jabatan Total 32 Pegawai

Pada tahun 2022, jumlah terbesar pegawai dengan jabatan fungsional tertentu di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah PFM Ahli Muda yaitu sebanyak 13 orang, Selain itu, terdapat 8 pegawai yang menduduki jabatan sebagai PFM Ahli Madya.

Selain dari jenjang pendidikan dan jabatan, pegawai Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik juga berasal dari lintas generasi. Komposisi ASN berdasarkan umur pegawai adalah sebagai berikut



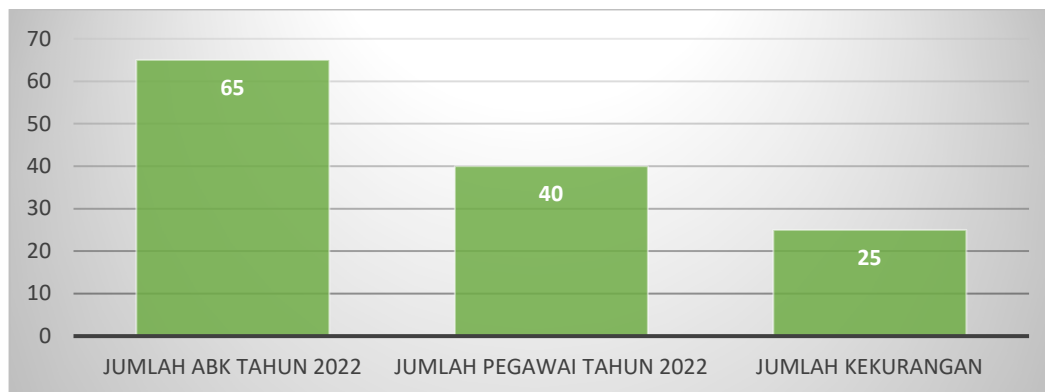
**Grafik 2.3** Profil SDM berdasarkan Umur

Dari grafik tersebut terlihat bahwa Generasi Milenial (27 – 45 tahun) mendominasi sejumlah 23 orang, dan disusul Generasi X (46 – 58 tahun) sebanyak 12 orang, dan Generasi Z (12 – 26 tahun) sebanyak 5 orang. Adapun pegawai yang akan memasuki pensiun sekitar 5 tahun lagi (PFM Madya) sebanyak 5 orang.

## 2. Kebutuhan Pegawai

Perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis menuntut SDM yang mampu beradaptasi serta ditopang dengan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya agar mampu berkinerja baik. Peningkatan kompetensi SDM secara berkesinambungan melalui *capacity building* yang terencana menjadi prioritas.

Berdasarkan Analisis Beban Kerja Tahun 2022, jumlah ideal pegawai Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebanyak 68 orang. Tetapi dengan kondisi saat ini, unit kerja masih kekurangan SDM sejumlah 25 orang. Berikut ini adalah profil kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja.



**Grafik 2.4.** Kebutuhan SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022 berdasarkan Analisis Beban Kerja

## 3. Peningkatan Kompetensi SDM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 70 bahwa setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 203 bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, maka setiap Lembaga Pemerintah wajib melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi bagi pegawainya. Sehingga setiap pegawai dilakukan peningkatan kompetensi minimal 20 JP dan dipantau di aplikasi SIASN. Hasil pemantauan peningkatan kompetensi minimal 20 JP pegawai tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.

**B. Sarana dan Prasarana**

Dalam mendukung terlaksananya seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik selain diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, perlu juga didukung dengan adanya sarana dan prasarana penunjang. Daftar inventaris kantor yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran 4.

**C. Anggaran**

Pada tahun 2022, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik memperoleh anggaran sebesar Rp10.823.607.000. Realisasi anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 adalah sebesar Rp10.816.197.739 atau sebesar 99,93% dari total pagu anggaran, dengan rincian seperti tertera pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

### BAB III HASIL KEGIATAN

<b>Sasaran Kegiatan 1</b>	<b>Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang prima</b>
<b>Indikator Kinerja Utama 1</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos diukur dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan kepada masyarakat penerima layanan. Survei dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos adalah konsultasi masyarakat dan pendampingan pelaku usaha dalam memenuhi standar di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan Kosmetik. Pelayanan ini dilakukan secara daring dan luring melalui:

1. Tatap Muka  
Gedung Athena lantai 1 Badan POM  
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
2. Email:  
pmpu.otskk@pom.go.id
3. Subsite:  
<https://pmpuotskkos.pom.go.id/>
4. Media Sosial:  
Instagram: pmpuotskk.bpom  
Facebook: pmpuotskk.bpom
5. WhatsApp:  
082122808413

SKM dilakukan setelah layanan publik diberikan layanan, data SKM diolah dan disusun menjadi laporan setiap triwulan. Data triwulan pada tahun 2022 Direktorat PMPU OTSKK adalah sebagai berikut:

Triwulan	Nilai	Kategori
1	92,44	Sangat Baik
2	91,01	Sangat Baik
3	91,87	Sangat Baik
4	91,77	Sangat Baik

Tabel 3.1 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat per triwulan tahun 2022

Dari data tersebut didapatkan indeks kepuasan masyarakat 88,31 yang termasuk ke dalam kategori baik. Masukan yang terdapat dalam SKM juga ditindaklanjuti dan dijadikan dasar riviui standar pelayanan selanjutnya.



Gambar 3.1 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat per triwulan tahun 2022

<b>Sasaran Kegiatan 2</b>	<b>Meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos</b>
<b>Indikator Kinerja Utama 1</b>	Persentase Pemda yang menerapkan program keamanan OT, SK dan Kos

Badan POM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan di wilayah Indonesia. Dari segi fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar lembaga Badan POM yaitu: penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market), pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) dan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta penguatan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan Efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai Besar/Balai POM.

Tantangan pengawasan obat dan makanan termasuk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik meningkat seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berdampak pada maraknya perdagangan secara daring, sehingga meningkatkan akses masyarakat terhadap penggunaan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara cepat dan tak terbatas. Informasi yang masif pada penjualan secara daring juga akan meningkatkan penjualan produk Obat Tradisional dengan klaim berlebihan dan produk kosmetika yang ilegal.

Badan POM dalam melakukan pengawasan tidak dapat bekerja sendiri, perlu kerjasama dengan lintas sektor khususnya Pemerintah Daerah. Kriteria pemerintah Daerah yang perlu mendapat intervensi adalah Peredaran OT dan Kosmetik yang berisiko tinggi (berdasarkan hasil pengawasan), jumlah UMKM OT, SK, dan Kosmetik relatif banyak dan tingkat partisipasi Pemda yang signifikan. Untuk itu perlu membangun komitmen Pemerintah Daerah terutama dalam melakukan pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, SK dan Kosmetik. Penerapan pelaksanaan kegiatan bersama lintas sektor pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Advokasi di Mataram Tentang pendampingan pembentukan sentra UMKM Garam Kosmetik. Sinergisitas bersama lintas sektor dalam rangka pilot project membangun sentra umkm garam kosmetika di provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan di Mataram pada tanggal 9 maret 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perindustrian (KEMENPERIN), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Dinas Perindustrian Provinsi NTB dan Badan Perencanaan Daerah Provinsi NTB.

2. Advokasi di Jawa Tengah tentang Eksplorasi Obat Bahan Alam dan TTK. Advokasi dilakukan tanggal 30-31 Mei 2022 di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Semarang (STIFAR Semarang). Tujuan kegiatan ini adalah untuk Memperoleh informasi terkait kurikulum Perguruan Tinggi di Jawa Tengah yang berkaitan dengan aspek CPOTB sehingga dapat menghasilkan lulusan TTK yang memahami dan mampu menerapkan CPOTB di sarana UKOT dan UMOT.
3. Rapat Sinergitas bersama BBPOM di DKI Jakarta beserta Pemerintah DKI Jakarta terkait Pendampingan Terkait Zonasi Bagi UMKM. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik bersinergi dengan Balai Besar POM di DKI Jakarta mengadakan rapat pembahasan kemudahan perizinan bagi UMKM di wilayah DKI Jakarta pada tanggal 3 Juni 2022 secara online. Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah DKI Jakarta yang terdiri dari Dinas PMPTSP, Dinas Kesehatan, dan dihadiri juga oleh pelaku usaha.
4. Sinergitas Lintas Sektor Dalam Rangka Pendampingan UMKM Obat Tradisional di Kendari Badan POM melalui Kedeputian 2 melakukan advokasi terhadap proses perizinan UMKM Obat Tradisional atas permintaan Balai POM di Kendari pada tanggal 23 Agustus 2022. Rapat sinergitas dilaksanakan di aula BPOM di Kendari. Rapat ini dihadiri oleh BPOM di Kendari, PAFI Kendari, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Universitas Halu Oleo, Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Tenggara, Jurusan Farmasi Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna Kendari.
5. Sinergitas Lintas Sektor Dalam Rangka Desa Wisata Jamu di Kiringan, Yogyakarta. Kegiatan sinergitas bersama lintas sektor merupakan upaya untuk mewujudkan Desa Wisata Jamu yang dilaksanakan di Kiringan Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 2022. Kegiatan kunjungan ke Desa Wisata Jamu Kiringan, Yogyakarta merupakan kolaborasi antara Badan POM, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Orang Tua Angkat Jamu (15 Industri Obat Tradisional) yang sudah memberikan kontribusi dalam pendampingan usaha jamu gendong melalui program orang tua angkat jamu.
6. Rapat sinergitas bersama Kemendikbudristek dalam rangka dukungan program pemberdayaan masyarakat. Rapat Sinergitas dengan Kemendikbud Ristek RI ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan POM dengan Kemendikbud Ristek RI nomor KS.01.01.1.2.10.21.15 dan nomor 15/X/NK/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Pada tanggal 25 Oktober 2022 dilakukan rapat finalisasi draft perjanjian kerjasama antara tim Badan POM yang terdiri dari Biro KSH, Dit. PMPU OTSKK, Dit. PMPU PO dengan Biro Hukor Ditjendiktiristek secara online. Perjanjian Kerjasama antara Sestama Badan POM dengan Plt. Dirjen Diktiristek ditandatangani secara desk to desk pada tanggal 2 November 2022.

7. Rapat Sinergitas bersama Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Profesi Tingkat Nasional. Rapat Sinergitas Bersama Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan serta Profesi Tingkat Nasional Dalam rangka Pembentukan Penyuluh Keamanan OT, SK, dan Kosmetik dan Kader Daerah OT, SK, dan Kosmetik Aman melalui Program Badan POM Goes to Community yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022 di Hotel Grand Mercure Jakarta.
8. FGD Sinergitas bersama Pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk Dukungan Program BPOM Goes to Community. FGD sinergitas bersama Pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk dukungan program Badan POM Goes to Community tanggal 30 Mei 2022 di Hotel Gumaya Semarang. Peserta FGD terdiri dari Kepala Balai Besar POM di Semarang, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan - Dinkes Propinsi Jawa Tengah, Sub Koordinator Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan - Dinas PPPA & KB Propinsi Jawa Tengah.
9. Rapat Dalam Rangka Jamu Goes to UNESCO untuk Pembudayaan Jamu. Rapat dalam rangka Jamu Goes to UNESCO dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2022. Rapat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Ke dalam Daftar ICH UNESCO. Peserta yang hadir adalah Komunitas Jamu yaitu Jonny Yuwono, MBA (ketua Tim Jamu Goes to Unesco), Ranny Pertiwi Zaman (Ketua GP Jamu), Gaura Mancacarita (Pemerhati Warisan Budaya), Devita (YPI) dan dari Kemendikbud Ristek, Anton Wibisono (Pamong Budaya Ahli Muda)
10. Advokasi Dalam Rangka Pilot Project Kolaborasi Program Badan POM Goes to Campus Dengan Magang Kerja Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Universitas Bengkulu. Dalam nota kesepahaman antara BPOM dengan Kemendikbudristek terdapat petunjuk untuk melakukan integrasi materi kedalam proses pembelajaran sehingga perlu dilakukan Rapat sinergitas dilaksanakan bersama Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Universitas Bengkulu pada tanggal 12 Desember 2022.

<b>Sasaran Kegiatan 2</b>	<b>Meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos</b>
<b>Indikator Kinerja Utama 2</b>	<b>Persentase duta yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat</b>

### 1. Program Badan POM Goes to School/Campus

Kegiatan pembentukan Duta Kosmetika Aman dan Duta Jamu Aman pada program Badan POM Goes to School atau disingkat Badan POM Goes to Campus atau disingkat BGoCamp merupakan pembentukan pelajar dan mahasiswa melalui Bimbingan Teknis untuk menjadi Duta Badan POM agar mampu Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang keamanan dan manfaat Obat Tradisional/Jamu dan Kosmetika kepada komunitas/masyarakat. kegiatan ini di-launching oleh Kepala Badan POM, Dr. Penny K. Lukito, MCP pada tanggal 2 Maret 2021, dilanjutkan dengan perluasan kegiatan untuk seluruh Indonesia pada tahun 2022. Milestone (pentahapan) perencanaan pelaksanaan pembentukan dan pemberdayaan Duta Kosmetik dan Jamu Aman tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### a. Menyusun petunjuk teknis program pembentukan Duta Kosmetik dan Jamu Aman

Dalam rangka persiapan Pembentukan Duta Kosmetika dan Jamu Aman dalam program Badan POM Goes to School/Campus seluruh Indonesia tahun 2022, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengadakan Rapat Penyusunan Petunjuk Teknis Pemilihan Duta Jamu/Kosmetika Aman pada tanggal 20 Januari 2022 di Hotel Grand Mercure. Rapat pembahasan Petunjuk Teknis ini dihadiri secara hybrid oleh Konsultan Ilmu Komunikasi, Fauzy Harmoko, Dit. PMPU OT, SK dan Kosmetik, Dit. Registrasi OT, SK dan Kos, Dit. Standarisasi OT, SK dan Kos, Dit. Pengawasan OT dan SK, Dit. Pengawasan Kosmetik, Dit. PMPU Pangan Olahan, Biro Kerjasama dan Humas serta Biro Hukum dan Organisasi



**Gambar 3.2** Rapat Penyusunan Petunjuk Teknis Pemilihan Duta Jamu/Kosmetika Aman pada tanggal 20 Januari 2022 di Hotel Grand Mercure

Petunjuk teknis ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut: latar belakang, dasar hukum, tujuan, manfaat, sasaran, tahapan pelaksanaan, kriteria calon Duta yang berasal dari pelajar dan mahasiswa, metode pemilihan Duta dan sistem monitoring, evaluasi dan penilaian.

Kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan *Training of Trainer* dan Pembentukan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat tingkat UPT BPOM. *Training of Trainer* bagi petugas UPT BPOM bertujuan agar petugas UPT BPOM mampu menjadi Fasilitator dalam pembentukan Duta Kosmetik dan Duta Jamu Aman. Fasilitator adalah petugas UPT yang menyelenggarakan binbingan teknis kepada calon Duta Kosmetik dan Duta Jamu Aman dan melakukan pendampingan kepada Duta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tentang keamanan, manfaat, dan mutu di bidang kosmetik dan/atau obat tradisional

**b. Melakukan *Training of Trainer* dan Pembentukan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di tingkat UPT BPOM**

ToT diselenggarakan pada tanggal 15-16 Maret 2022 di Hotel Margo City, Depok dan dihadiri oleh 2 orang petugas UPT BPOM dari masing-masing UPT BPOM. Materi pembekalan meliputi profil BPOM , Aplikasi BPOM Mobile, aplikasi monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Kosmetik, Cerdas Memilih Obat Tradisional dan Kosmetik Aman, *Public Speaking* dan Juknis Pembentukan Duta Kosmetik dan Duta Jamu Aman. Dari hasil post test (nilai kelulusan minimal 70) dikukuhkan sebanyak 151 orang Petugas UPT BPOM sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat UPT BPOM di 73 UPT BPOM



**Gambar 3.3** ToT dan Pembentukan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat UPT BPOM

c. **Melakukan pembentukan Duta Kosmetik dan Jamu Aman oleh 73 UPT BPOM**

Tahap selanjutnya adalah pembentukan 1658 Duta Kosmetik Aman di 71 UPT dan 264 Duta Duta Jamu Aman oleh 13 UPT BPOM pada kurun waktu bulan April sampai dengan Juli 2022. Pemberdayaan Masyarakat UPT BPOM setempat yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Sekolah dan Perguruan Tinggi. Sebanyak 35 sekolah dan 217 Perguruan Tinggi mengirmkan calon Duta untuk mengikuti seleksi pembentukan Duta Kosmetik dan Duta Jamu Aman. Calon Duta mengikuti bimbingan teknis dengan materi meliputi profil BPOM, Aplikasi BPOM Mobile, aplikasi e-monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Kosmetik, Cerdas Memilih Obat Tradisional dan Kosmetik Aman, Public Speaking dan speech contest. Sebagai output telah dibentuk 252 orang Duta Terbaik 1,2,3 UPT se Indonesia meliputi 213 Duta Kosmetik Aman di 71 UPT dan 39 Duta Jamu Aman di 13 UPT. Kemudian UPT BPOM merekomendasikan untuk mengikuti *Advanced Training Duta* dan akan diberdayakan oleh pusat sebagai *spokesperson* Badan POM



**Gambar 3.4** Pembentukan Duta Kosmetik dan Jamu Aman oleh Fasilitator di UPT BPOM

d. **Melaksanakan *Advanced Training Duta (ATD)* untuk Duta Kosmetik dan Jamu Aman terbaik**

Selanjutnya diselenggarakan *Advanced Training Duta (ATD)* yang merupakan pelatihan lanjutan yang diselenggarakan oleh Dit PMPUOTSKK untuk Duta, agar mampu melakukan KIE kepada komunitasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Peserta ATD adalah Duta Kosmetik dan Duta Jamu Aman terbaik yang ditetapkan oleh UPT BPOM. Sebanyak 213 Duta Kosmetik dan 39 Duta Jamu Aman mengikuti ATD yang diselenggarakan pada tanggal 16-17 Juli 2022 di Hotel Horison Ultima, Bekasi dengan materi pembekalan meliputi penyikapan terhadap isu obat tradisional dan kosmetik serta keterampilan dalam komunikasi dan pemanfaatan IT. Materi yang disampaikan dalam acara ATD adalah sebagai berikut:

- Teknik membuat presentasi dan infografis oleh **Indra Riswadinata, M.H** (*Media Presentation Trainer - BRIN*)
- Sharing pengalaman tentang kosmetik aman (Tampil Cantik dengan Cek KLIK) oleh Brand Ambassador: PT. Paragon (**Dinda Hauw**)

- *Public Speaking* oleh **Magiana Ignasia, S.Psi** (Puteri Indonesia Intelegensia 1 Tahun 2022)
- *Sharing* pengalaman sebagai Duta YPI dan motivasi oleh **Laksmi Shari De Neeffe Suardana** (Puteri Indonesia Tahun 2022)
- Teknik Membuat Video Digital oleh **Alfan Noviar** (*Digital Video Trainer - Divisi Media Digital Tempo*)
- Mengenal Jamu Nusantara oleh **Dr. rer.nat. Apt. Nanang Fakhruddin, M.Si** (Wakil Dekan Fakultas Farmasi - UGM)
- Bahan Berbahaya pada Kosmetik dan akibatnya oleh **dr. Listya Pramita, Sp. KK**
- Materi yang diberikan oleh petugas Badan POM yaitu tentang Penyalahgunaan BKO pada Jamu/Obat Tradisional, Tren Pengawasan Jamu/Obat Tradisional, Aplikasi BPOM Mobile dan Aplikasi Monitoring Efek Samping Obat Tradisional, Tren Pengawasan Kosmetik, Aplikasi BPOM Mobile dan Aplikasi Efek Samping Kosmetik, Mengenal Kosmetik Tematik, Petunjuk Teknis dan Tata cara Pelaporan Kegiatan Duta.
- Pelatihan tata rias (*beauty class*) dari Yayasan Putri Indonesia (YPI).



**Gambar 3.5.** Pembekalan dan Pelatihan Tata Rias oleh Narasumber dari Yayasan Putri Indonesia (YPI)

#### e. Melakukan sosialisasi tata kerja dan tata laksana pelaporan tugas Duta

Dalam acara ATD pada tanggal 16-17 Juli 2022, panitia melakukan sosialisasi tentang tata kerja dan tata laksana pelaporan tugas Duta kepada peserta. Dalam petunjuk teknis, Duta Kosmetik dan Duta Jamu Aman memiliki tugas/kewajiban melakukan KIE minimal 3 kali kepada minimal 25 orang per kegiatan, membuat minimal 1 video edukasi terkait keamanan dan manfaat obat tradisional/kosmetik dan berpartisipasi dalam program Badan POM.



**Gambar 3.6** Sosialisasi Petunjuk Teknis Pemilihan Duta Jamu/Kosmetika Aman

**f. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas KIE Duta**

Tahap berikutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas KIE Duta pada kurun waktu Juli - Oktober 2022. Sampai dengan saat ini 252 Duta terbaik telah melakukan KIE kepada **1.955.850** orang.



**Gambar 3.7** Duta Kosmetik dan Duta Jamu Aman melakukan KIE kepada komunitas masyarakat

**g. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan KIE Duta**

Tahap akhir adalah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan KIE Duta sesuai dengan Berita Acara Komitmen yang telah ditanda tangani oleh 252 Duta Kosmetik dan Duta Jamu Aman pada minggu ke 2 dan 3 Bulan November 2022. Dari hasil penilaian KIE Duta akan dipilih 6 (enam) nominator Duta yang memiliki bobot nilai tertinggi, yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi 5 (lima) Duta Kosmetik Aman Terbaik Nasional dan 5 (lima) Duta Jamu Aman Terbaik Nasional sebagai berikut :

**Duta Kosmetik Aman Terbaik Nasional**

Peringkat	Nama Duta	Asal UPT
Juara 1	Albianus Febri Tarung	BBPOM di Pontianak
Juara 2	Adjeng Pratiwi Djatmiko	Balai POM di Jambi
Juara 3	Fando	Balai POM di Jambi
Juara 4	Rachel Patricia	BBPOM di Semarang
Juara 5	Zahwa Nur Fajri Rahely	Loka POM di Indragiri Hilir

**Tabel 3.2** Duta Kosmetik Aman Terbaik Nasional

**Duta Jamu Aman Terbaik Nasional**

Peringkat	Nama Duta	Asal UPT
Juara 1	Alfirdausy	Loka POM di Payakumbuh
Juara 2	Nuri Utami	Loka POM di Surakarta
Juara 3	Kadek Dharma Ferdy	Loka POM di Buleleng
Juara 4	Fitria Nur fadilah	Loka POM di Banyumas
Juara 5	Yoan Prisilya Omega Lopies	Balai POM di Kupang

**Tabel 3.3** Duta Jamu Aman Terbaik Nasional

## 2. Program Badan POM Goes To Community

Dalam rangka memberikan pemahaman yang baik tentang keamanan penggunaan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik kepada masyarakat, Badan POM telah membentuk kegiatan strategis terkait pemberdayaan, yang bertujuan agar masyarakat meningkat pemahaman dan pengetahuannya sehingga terhindar dari penggunaan produk yang tidak memenuhi syarat dan berbahaya bagi kesehatan. Kegiatan pemberdayaan tersebut diberi nama “Program Badan POM Goes To Community”. Program ini merupakan kegiatan Sinergisitas Bersama Lintas sektor dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan serta Organisasi Profesi, dalam rangka Pembentukan Penyuluh/Kader OT, SK, dan Kosmetik Aman.

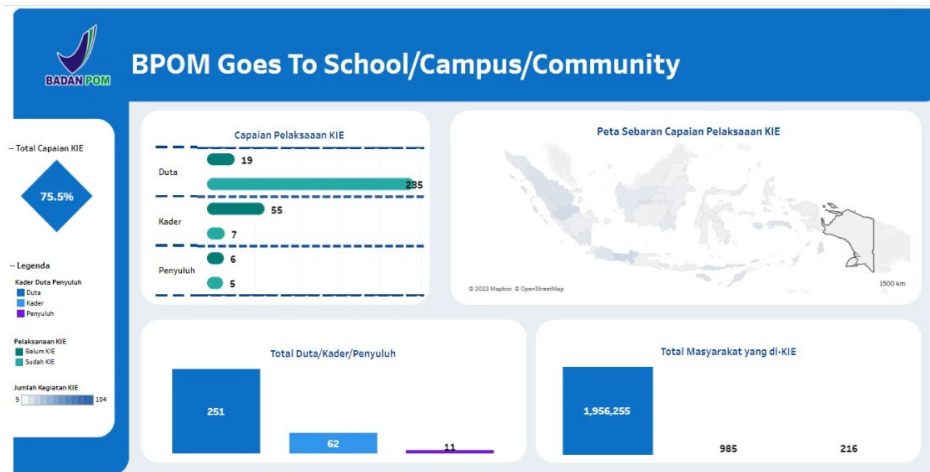
Kegiatan diawali dengan rapat koordinasi Badan POM bersama pengurus pusat organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi profesi pada tanggal 18 Mei 2022 di Jakarta, selanjutnya pada tanggal 30-31 Mei 2022 dilakukan bimbingan teknis dan pembentukan penyuluh OT, SK dan Kosmetik aman di kota Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah beserta 16 organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi profesi meliputi: Muslimat NU, Aisyiyah, Bhayangkari, Persatuan Istri Tentara/PERSIT, Dharma Wanita Persatuan, Salimah, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia/IPEMI, Fatayat NU, Kwartir Daerah Jawa Tengah, BKOW, Gerakan Ekonomi Kreatif dan Keluarga Besar Putra Putri POLRI, IAI, IIDI dan PAFI).



**Gambar 3.8** Kegiatan Pembentukan Penyuluh Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Aman di Jawa Tengah

## Hasil Kegiatan BPOM Goes To Community Tahun 2022

1. Telah terbentuk Penyuluh Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika Aman di Propinsi Jawa Tengah sebanyak 33 orang dari 16 Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi.
2. Penyuluh telah mendapatkan Pelatihan dan Bimbingan Teknis dari Badan POM dan telah lulus *Pre-Test* dan *Post-Test*.
3. Penyuluh telah melakukan Bimbingan Teknis (ToT) dan membentuk Kader Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika Aman kepada pengurus kabupaten/kota/Kecamatan yang berasal dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi jajarannya sebanyak 62 orang Kader.
4. Capaian KIE oleh Kader dan Penyuluh sampai Desember 2022 berjumlah 1201 orang.



**Gambar 3.9** Dashboard Laporan BPOM Goes to School/Campus/Community pada BPOM Operational Center di bulan Desember 2022

<b>Sasaran Kegiatan 3</b>	<b>Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, SK, dan Kos</b>
<b>Indikator Kinerja Utama 1</b>	Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK

### 1. Koordinasi Pemberdayaan OT, SK dan Kos serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor

Koordinasi perlu dilakukan oleh Dit PMPU OT SK Kos serta perlu Kerjasama lintas sektor. Kegiatan ini mengakomodir kegiatan yang perlu biaya mandiri dari lintas sektor yang mengundang Dit PMPU OT SK Kos

### 2. Advokasi di Mataram Tentang pendampingan pembentukan sentra UMKM Garam Kosmetik

Sinergisitas bersama lintas sektor dalam rangka pilot project membangun sentra umkm garam kosmetika di provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan di Mataram pada tanggal 9 maret 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perindustrian (KEMENPERIN), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Dinas Perindustrian Provinsi NTB dan Badan Perencanaan Daerah Provinsi NTB. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan program pendampingan usaha garam kosmetik menuju izin edar produk



**Gambar 3.10** Advokasi tentang Pendampingan Pembentukan Sentra UMKM Garam Kosmetik di Mataram

### 3. Advokasi di Jawa Tengah tentang Eksplorasi Obat Bahan Alam dan TTK

Dalam rangka memberikan iklim usaha yang kondusif bagi produsen Obat Tradisional perlu dilakukan pengaturan usaha Obat Tradisional dengan memperhatikan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat Tradisional yang diproduksi sesuai dengan pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan diatur mengenai Penanggung Jawab Teknis untuk UKOT adalah Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dan Apoteker/TTK yang terlatih untuk produk kapsul dan cairan obat dalam, sedangkan untuk dan UMOT adalah Tenaga Kesehatan Tradisiona Jamu/TTK.

Tantangan yang dihadapi saat ini di lapangan adalah TTK yang dihasilkan belum memiliki kualifikasi yang mumpuni terhadap pemahaman dan penerapan CPOTB pada sarana UKOT dan UMOT. Oleh karena itu, diperlukan rapat sinergitas dengan Perguruan Tinggi /Akademi/Poltekes di Jawa Tengah yang menghasilkan lulusan TTK, mengenai penerapan kurikulum yang berkaitan dengan aspek CPOTB sehingga ke depan akan dihasilkan TTK yang sesuai kualifikasi CPOTB. Advokasi dilakukan tanggal 30-31 Mei 2022 di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Semarang (STIFAR Semarang). Tujuan kegiatan ini adalah untuk Memperoleh informasi terkait kurikulum Perguruan Tinggi di Jawa Tengah yang berkaitan dengan aspek CPOTB sehingga dapat menghasilkan lulusan TTK yang memahami dan mampu menerapkan CPOTB di sarana UKOT dan UMOT



**Gambar 3.11** Advokasi tentang Eksplorasi Obat Bahan Alam dan TTK di Jawa Tengah

#### **4. Rapat Sinergitas bersama BBPOM di DKI Jakarta beserta Pemerintah DKI Jakarta terkait Pendampingan Terkait Zonasi Bagi UMKM**

Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Peran pemerintah untuk mendukung ekosistem berusaha khususnya UMKM obat tradisional dan kosmetik sejalan dengan misi Badan POM yaitu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik bersinergi dengan Balai Besar POM di DKI Jakarta mengadakan rapat pembahasan kemudahan perizinan bagi UMKM di wilayah DKI Jakarta pada tanggal 3 Juni 2022 secara online. Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah DKI Jakarta yang terdiri dari Dinas PMPTSP, Dinas Kesehatan, dan dihadiri juga oleh pelaku usaha. Permasalahan yang dibahas dalam rapat ini adalah mengenai izin zonasi bagi UMKM obat tradisional dan kosmetik dimana berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang masih melarang berdirinya usaha obat tradisional/jamu di zona hijau (pemukiman) dan hal ini tidak sesuai dengan Permen PU dan Perumahan Rakyat RI nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan SLF Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Kesimpulan dalam rapat ini adalah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk menyesuaikan Perda DKI agar memberikan izin bagi UMKM di zona hijau yang memiliki tingkat resiko rendah

#### **5. Sinergitas Lintas Sektor Dalam Rangka Pendampingan UMKM Obat Tradisional di Kendari**

Badan POM melalui Kedeputian 2 melakukan advokasi terhadap proses perizinan UMKM Obat Tradisional atas permintaan Balai POM di Kendari pada tanggal 23 Agustus 2022. Rapat sinergitas dilaksanakan di aula BPOM di Kendari. Rapat ini dihadiri oleh BPOM di Kendari, PAFI Kendari, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Universitas Halu Oleo, Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Tenggara, Jurusan Farmasi Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna Kendari. Materi pembahasan dalam rapat sinergitas ini adalah sebagai berikut:

- a. Sinergisitas dengan Lintas Sektor dalam Rangka Pendampingan UMKM Obat Tradisional;
- b. Peran PAFI dalam Penyediaan TTK yang memenuhi Standar untuk Penanggung Jawab Teknis di UMKM Obat Tradisional;
- c. Peran Pemerintah Daerah dalam Ketersediaan Penanggung Jawab Teknis di UMKM Obat Tradisional di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. Sistem Pembelajaran Perguruan Tinggi dalam Memenuhi Kompetensi Lulusan untuk Menjadi Penanggung Jawab Teknis di UMKM Obat Tradisional
- e. Sistem Pembelajaran Perguruan Tinggi dalam Memenuhi Kompetensi Lulusan untuk Menjadi Penanggung Jawab Teknis di UMKM Obat Tradisional
- f. Peran IAI dalam Penyediaan TTK yang memenuhi Standar untuk Penanggung Jawab Teknis di UMKM Obat Tradisional

Kesimpulan dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Balai POM di Kendari akan memfasilitasi narasumber untuk pelaksanaan pelatihan CPTOB kepada TTK
- b. PAFI akan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Balai POM di Kendari untuk mengadakan pelatihan kepada TTK agar kualifikasi TTK yang bekerja pada Industri UKOT (TTK terlatih) dapat tercapai
- c. Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara akan berkolaborasi dengan Balai POM di Kendari dalam melakukan pendampingan kepada UMKM OT di Provinsi Sulawesi Tenggara terkait proses perijinan UMOT dan UKOT.
- d. Farmasi UHO dalam Memenuhi Kompetensi Lulusan untuk Menjadi Penanggung Jawab Teknis di UMKM Obat Tradisional telah memuat materi/kurikulum yang mendukung kompetensi tersebut.
- e. IAI akan membantu dalam penyediaan TTK yang memenuhi standar untuk penanggungjawab teknis Obat tradisional yaitu menyelenggarakan pelatihan CPOTB.
- f. Proses pembelajaran/kurikulum di Fakultas Farmasi ITK Avicenna telah mengikuti standar standar nasional pendidikan tinggi wajib.



**Gambar 3.12** Sinergisitas Lintas Sektor Dalam Rangka Pendampingan UMKM Obat Tradisional di Kendari

<b>Sasaran Kegiatan 3</b>	<b>Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, SK, dan Kos</b>
<b>Indikator Kinerja Utama 2</b>	Persentase pemda yang diintervensi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan OT, SK, dan Kos

### 1. Rapat sinergitas bersama Kemendikbudristek dalam rangka dukungan program pemberdayaan masyarakat

Rapat Sinergisitas dengan Kemendikbud Ristek RI ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan POM dengan Kemendikbud Ristek RI nomor KS.01.01.1.2.10.21.15 dan nomor 15/X/NK/2021 tanggal 19 Oktober 2021 pada pasal 3 tentang ruang lingkup poin (b) dan (e), yaitu:

- Pengintegrasian materi keamanan Obat dan Makanan dalam proses pembelajaran; dan
- Dukungan pelaksanaan program prioritas, meliputi namun tidak terbatas pada Pendidikan, Program Merdeka Belajar, Praktek Kerja Nyata, program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS), program Pangan Aman *goes to Campus*, program Badan POM *goes to Campus*, UKS.

Pada tahap awal dilakukan Rapat Sinergisitas pada tanggal 19 April 2022 bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek RI dengan mengajak pihak terkait Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kesimpulan hasil rapat adalah sebagai berikut:

- Integrasi Kurikulum dan Program di Perguruan Tinggi
  - a. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) terdiri dari Magang/Praktik Industri, Mengajar di Sekolah, proyek Kemanusiaan, Studi/Proyek Independen, Wirausaha, Penelitian, Pertukaran Pelajar, Proyek di Desa/KKN, dan Bela Negara
  - b. Pendekatan program Badan POM Goes to School/Campus dalam rangka pemberdayaan Duta Jamu Aman dan Duta Kosmetik Aman dapat difasilitasi dalam 2 jenis program MBKM yaitu Magang dan KKN/proyek Desa.
  - c. Program Magang Kerja di BPOM lebih memungkinkan dipilih untuk kolaborasi dengan program Badan POM Goes to School/Campus melalui KIE Duta Jamu Aman dan Duta Kosmetik Aman.
  - d. Integrasi kurikulum dilakukan dengan memasukkan materi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam program Magang/KKN yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebanyak 20 SKS (6 bulan) atau 40 SKS (1 tahun).

- Integrasi Kurikulum dan Program di Pendidikan Menengah dan Vokasi (SMA dan SMK)
  - a. Integrasi kurikulum pada Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dipilih dari beberapa jenis kategori kurikulum yang berlaku yaitu:
    - 1) Kurikuler: Integrasi ke dalam kurikulum nasional melalui mata pelajaran (Melalui KD yang sesuai Silabus, RPP, Bahan Ajar)
    - 2) Suplemen/pengayaan sesuai kebutuhan daerah/satuan pendidikan (penambahan Kompetensi Dasar baru pada mata pelajaran Silabus, RPP, Bahan Ajar)
    - 3) Muatan lokal (mata pelajaran tersendiri)
    - 4) Kokurikuler
    - 5) Program pembudayaan/pembiasaan di satuan pendidikan
    - 6) Ekstrakurikuler
    - 7) Konteks pada mata pelajaran
  - b. Program yang dapat dikolaborasikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah adalah dalam program Merdeka Belajar yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ini merupakan program lintas disiplin untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan sekitar dengan mengalokasikan waktu untuk mendapatkan pengetahuan yang memperkuat karakter Pancasila.
  - c. Program pembudayaan/pembiasaan di Satuan Pendidikan dapat dimasukkan Budaya Sehat Minum Jamu di setiap sekolah seperti Jamu Day dll

Rapat Koordinasi Lanjutan pada tanggal 19 Mei 2022 bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dihadiri oleh Koordinator Pembelajaran Belmawa, Dewi Wulandari, S.Si. Hasil Rapat adalah sebagai berikut:

- Mahasiswa yang terlibat dalam magang kerja diharapkan dapat menjadi fasilitator, enterpreneur, atau konsultan.
- Tahapan proses integrasi program Badan POM *Goes to School/Campus* untuk Duta Jamu dan Kosmetik Aman dalam kurikulum Kampus Merdeka Belajar



**Gambar 3.14** Rapat Sinergitas bersama Ditjen Dikti, Kemendikbudristek

Rapat koordinasi lanjutan pada tanggal 20 Mei 2022 bersama Badan Standar, Kurikulum, dan *Assessment* Pendidikan oleh Farhan Ariani (Koordinator Substansi Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan). Hasil Rapat adalah sebagai berikut:

- Perlu dibuat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Badan Standar, Kurikulum, dan *Assessment* Pendidikan yang membawahi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran terkait integrasi kurikulum.
- Perlu kajian lebih lanjut terhadap 4 Modul BGoS (Profil BPOM, OT, SK dan Kosmetik), Modul dikirimkan ke Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (PIC: Ibu Lestiyani).
- Perlu adanya Surat Edaran dari Kemendikbud kepada Sekolah untuk menyampaikan Modul Obat Tradisional dan Modul Kosmetik Aman sebagai usulan muatan lokal.
- Perlu pembahasan lanjutan terkait *Project* Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang berkaitan dengan edukasi OT, SK, dan Kosmetik Aman.



**Gambar 3.15** Rapat Koordinasi Lanjutan bersama Badan Standar, Kurikulum, dan *Assessment* Pendidikan , Kemendikbudristek

Pada tanggal 25 Oktober 2022 dilakukan rapat finalisasi draft perjanjian kerjasama antara tim Badan POM yang terdiri dari Biro KSH, Dit. PMPU OTSKK, Dit. PMPU PO dengan Biro Hukor Ditjendiktiristek secara online. Perjanjian Kerjasama antara Sestama Badan POM dengan Plt. Dirjen Diktiristek ditandatangani secara *desk to desk* pada tanggal 2 November 2022.



**Gambar 3.16** Penandatanganan PKS oleh Sestama Badan POM dengan Plt Dirjen Diktiristek

## 2. Rapat Sinergitas bersama Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Profesi Tingkat Nasional

Dalam rangka Pembentukan Penyuluh Keamanan OT, SK, dan Kosmetik dan Kader Daerah OT, SK, dan Kosmetik Aman melalui Program Badan POM Goes to Community yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022 di di Hotel Grand Mercure Jakarta.

Peserta terdiri dari

- Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik *Kementerian Dalam Negeri*
- Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Tingkat Nasional (PKK, Fatayat NU, Salimah, Aisyiyah, Dharma Wanita Pusat, Kongres Wanita Indonesia, PGI/Persatuan Gereja Indonesia, Karang Taruna, Persit/Persatuan Istri Tentara Indonesia, dan Bayangkari)
- Organisasi Profesi Tingkat Nasional (IDI/Ikatan Dokter Indonesia, IAI/Ikatan Apoteker Indonesia, PII/Persatuan Istri Insinyur, PAFI/ Persatuan Ahli Farmasi Indonesia)
- Organisasi Pendidikan Non Formal Tingkat Nasional (Kwartir Nasional Gerakan Pramuka)

Tujuan kegiatan adalah bersama Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Tingkat Nasional menyusun rencana aksi dan memberikan masukan terhadap program Badan POM Goes to Community



**Gambar 3.17** Rapat Sinergitas bersama Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi di Jakarta

### 3. FGD Sinergitas bersama Pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk Dukungan Program BPOM Goes to Community

FGD sinergitas bersama Pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk dukungan program Badan POM Goes to Community tanggal 30 Mei 2022 di Hotel Gumaya Semarang.

Peserta FGD terdiri dari:

- a. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- b. Kepala Balai Besar POM di Semarang
- c. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan - Dinkes Propinsi Jawa Tengah
- d. Sub Koordinator Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan - Dinas PPPA & KB Propinsi Jawa Tengah

Pada pertemuan ini disepakati untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan Orsosmas dan profesi di wilayah Jawa Tengah



**Gambar 3.18** FGD Sinergitas bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Dukungan Program BPOM Goes to Community

### 4. Rapat Dalam Rangka Jamu Goes to UNESCO untuk Pembudayaan Jamu

Rapat dalam rangka Jamu Goes to UNESCO dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2022.

Rapat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Ke dalam Daftar ICH UNESCO.

Peserta yang hadir adalah

- a. Komunitas Jamu yaitu:
  - Jonny Yuwono, MBA (ketua Tim Jamu Goes to Unesco)
  - Ranny Pertiwi Zaman (Ketua GP Jamu)
  - Gaura Mancacarita (Pemerhati Warisan Budaya)
  - Devita (YPI)
- b. Kemendikbud Ristek, Anton Wibisono (Pamong Budaya Ahli Muda)

Pendaftaran ke UNESCO oleh kemendikbud telah diajukan pada tanggal 31 Maret 2022, dan ini akan melalui tahapan seleksi dimana hasilnya akan ditetapkan pada bulan November sampai Desember 2023. Hasil diskusi adalah sebagai berikut:

- a. UNESCO akan menilai Jamu sebagai Warisan Budaya berdasarkan aktivitas bukan seremonial misalnya jamu dijadikan kebiasaan masyarakat seperti Jamu *Day* atau Hari Jamu.
- b. Badan POM, Kemendikbud Ristek dan Komunitas Jamu sebagai peserta rapat sepakat akan menyusun rencana aksi bersama untuk pemasyarakatan jamu melalui Hari minum Jamu terutama dengan pemberdayaan Duta Jamu Aman yang sudah dibentuk dalam program Badan POM *goes to School* di sekolahny masing-masing, maupun dalam *event* kegiatan pemerintahan dan organisasi.
- c. Badan POM akan memulai budaya minum jamu setiap jumat setelah acara olahraga/senam



**Gambar 3.19** Rapat dalam rangka Jamu Goes to UNESCO untuk Pemberdayaan Jamu

#### **5. Advokasi Dalam Rangka *Pilot Project* Kolaborasi Program Badan POM Goes to Campus Dengan Magang Kerja Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Universitas Bengkulu**

Dalam rangka perluasan peran serta pelajar dan mahasiswa dalam program pemberdayaan masyarakat di Badan POM perlu didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek RI. Program pemberdayaan dapat diperkuat dalam integrasi kurikulum keamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan dan dukungan terhadap program Badan POM *Goes to School/Campus* bagi pelajar dan mahasiswa. Ini sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman/MoU antara Badan POM dengan Kemendikbudristek Tahun 2018 Nomor HK.09.01.1.351.02.18.1295 dan Nomor 04/11/NK/2018 yang selanjutnya diperpanjang pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan nomor KS.01.01.1.2.10.21.15 dan nomor 15/X/NK/2021.

Dalam nota kesepahaman terdapat petunjuk untuk melakukan integrasi materi kedalam proses pembelajaran sehingga perlu dilakukan Rapat sinergitas dilaksanakan bersama Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Universitas Bengkulu pada tanggal 12 Desember 2022. Dalam rapat dihasilkan poin kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sinergi Penyelenggaraan Program Prioritas dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Bidang Obat dan Makanan dengan 20 SKS (6 Bulan) dapat dilaksanakan di Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, sedangkan untuk Program Studi Ilmu Keperawatan dan Program Studi Profesi Ners, dapat dilaksanakan ke dalam 2 SKS melalui mata kuliah praktek medik.
- b. Universitas Muhammadiyah Bengkulu khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat sangat mendukung program *Badan POM Goes to School/Campus* dan siap mendukung apabila diminta terlibat lebih komprehensif dalam kegiatan ini.
- c. Badan POM, melalui Dit. PMPU OTSKKOS akan mengadakan *Forum Grup Discussion* (FGD) dengan Universitas/Perguruan Tinggi yang terlibat dalam program *Badan POM Goes to School/Campus*, sebelum pelaksanaan kegiatan Pembentukan Duta Kosmetik/Jamu Tahun 2023. Pelaksanaan FGD ini diharapkan agar nantinya Duta Kosmetik/jamu Aman mendapatkan dukungan penuh dari Universitas/Kampus dalam pelaksanaan KIE (pelaksanaan tugas-tugas sebagai Duta).
- d. Magang praktek dan program *Badan POM Goes To Campus* merupakan dua kegiatan sebagai bentuk implementasi MoU antara UNIB dengan BPOM/Balai POM.
- e. Implementasi MBKM dalam mendukung program *Badan POM Goes To Campus* dapat menjadi indikator kinerja utama UNIB.

Tim Konversi SKS di masing-masing prodi D3 Farmasi, S1 Farmasi, S1 Biologi, S1 Kimia akan mengkonversi kekurangan 12 SKS mahasiswa di luar SKS Magang Kerja



**Gambar 3.20** Advokasi dalam rangka Pilot Project Kolaborasi Program Badan POM Goes to School dengan Magang Kerja Mahasiswa di Bengkulu

<b>Sasaran Kegiatan 4</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas UPT BPOM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, SK dan Kos</b>
<b>Indikator Kinerja Utama 1</b>	Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan masyarakat

### 1. *Kick Off dan Training of Trainer*

Berdasarkan hasil pengawasan Badan POM tahun 2021, trend pelanggaran iklan obat tradisional masih tinggi walaupun terjadi penurunan, yaitu 41,08% pada tahun 2020 menjadi 27,67% pada tahun 2021. Pelanggaran iklan kosmetika semakin meningkat yaitu 19,89% pada tahun 2020 menjadi 27,85% pada tahun 2021. Temuan pelanggaran didominasi oleh klaim yang dilarang/berlebihan/menyesatkan pada tahun 2021 (83,1%) lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 (75,5%). Menyikapi fenomena tersebut, Badan POM selaku instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengawasan Obat dan Makanan, termasuk di dalamnya komoditi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika, menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi generasi muda (pelajar menengah dan mahasiswa) tentang pemilihan dan penggunaan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika yang aman, bermanfaat dan bermutu melalui program Badan POM Goes to School dan Badan POM Goes to Campus yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika dalam bentuk kegiatan pemberdayaan kepada generasi muda melalui pembentukan Duta Jamu/Kosmetik Aman sebagai *spokeperson* Badan POM.

*Kick Off* adalah tanda dimulainya pelaksanaan program Badan POM Goes to School dan Badan POM Goes to Campus yang pada tahun 2022 dan seterusnya akan dilaksanakan pemilihan Duta Kosmetika/Jamu Aman oleh seluruh UPT Badan POM. Untuk itu terlebih dahulu ditentukan 2 orang fasilitator dari masing-masing UPT untuk dilakukan *Training Of Trainer (ToT)*. Jadi fasilitator adalah Petugas UPT yang menyelenggarakan bimbingan teknis kepada calon Duta Kosmetika/Jamu Aman dan melakukan pendampingan kepada Duta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tentang keamanan, manfaat, dan mutu di bidang kosmetik dan/atau obat tradisional. ToT dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik secara *hybrid* mulai tanggal 15-16 Maret 2022 di Hotel Margo Depok dengan dihadiri fasilitator dari seluruh UPT BPOM seluruh Indonesia

No	UPT	Fasllitator	PIC
1	BBPOM di Banda Aceh	1. Nurlinda Lubis 2. Yanti, ST.	Ardiyansyah
2	BBPOM di Medan	1. Dwi Setio Purnomo, S.Si, Apt, M.Sc 2. Yanti Agustini, S.Si., Apt. M.Kes	Ardiyansyah
3	BBPOM di Padang	1. Novita Normasari 2. Reni Sepriyanti, S.Farm., Apt.	Dinny
4	BBPOM di Pekanbaru	1. Sonya Annisa, S.Farm., Apt. 2. Yudha Agus Pranata Barutu	Ronaldi
5	BBPOM di Palembang	1. Adella Mustika Sahara 2. Gustini	Ronaldi
6	BBPOM di Bandar Lampung	1. Dony Kusuma Wardhana, S.Farm., M.Si 2. Floriana Sundari Loung	Yulinar
7	BBPOM di Serang	1. Setya Wulan Widaningsih 2. Supertiwi	Hermaniar
8	BBPOM di Jakarta	1. Santy Athifah Zakiyah, S.Si 2. Wulan Sadat Wati	Christy Cecilia
9	BBPOM di Bandung	1. Prassita Idzni Alifah, STP. 2. Wideasri Teristra Anggit Sukarno, S.Farm., Apt.	Ardiyansyah
10	BBPOM di Semarang	1. Maria Regina Arwindya Retni Andrasita 2. Suci Wulandari, STP	Wiwi Hartuti
11	BBPOM di Yogyakarta	1. Dra. Yustina Etik Handayani Pujiastuti, Apt. 2. Herllya Selvi Wardani	Hermaniar
12	BBPOM di Surabaya	1. Arvita Ayuningtyas, S.Farm., Apt. 2. Meliza Miranda Widyasari, S.Si., Apt.	Hermaniar
13	BBPOM di Pontianak	1. Evi Prasetyoningtyas 2. Rinatal Naibaho SKM	Wiwi Hartuti
14	BBPOM di Palangkaraya	1. Astry Talenta Betharia, S.Si 2. Fadhriah, S.Farm,Apt	Dinny
15	BBPOM di Samarinda	1. Diah Agustiani Syarifah, S.Farm.,Apt 2. Fitriyana,S.KM	Wiwi Hartuti
16	BBPOM di Banjarmasin	Yuyun Purwaningsih, S.Farm., Apt	Ardiyansyah
17	BBPOM di Manado	1. Natalia Angelia Pasalli',S.Si.,Apt. 2. Suilan Martha Sophia Ombeng	Yulinar

18	BBPOM Makasar	di	1. Abdul Rahman, S.Si Apt.,MM. 2. Ana Adriyani 3. Dra.St.Rusnah N,Apt 4. Irdaz Rezkina Azis, S.Farm., Apt 5. St. Rusmin, SH	Yulinar
19	BBPOM Denpasar	di	1. Made Yanthi Trisnawati 2. Ni Putu Ekayani Scorpiasanty L, S. si., Apt., M. Biomed.	Dinny
20	BBPOM Mataram	di	1. I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. 2. Rosita Mardiani, STP	Dinny
21	BBPOM Jayapura	di	1. Naila Shufa, S.Farm., Apt 2. Nugroho Budi Santoso	Yulinar
22	BPOM di Batam		1. Amdani 2. Rr.Elda Prastuti,A.Md	Dinny
23	BPOM di Jambi		1. Febriany Martiana Nasel 2. Tutut Rospyanti Citra S.Farm,Apt	Yulinar
24	BPOM Pangkal Pinang	di	1. Andhika Achmad Sugiarto. 2. Puspa Sari Paniti Ratri, S.Farm.,Apt	Yogaswara
25	BPOM Bengkulu	di	1. Dewi Nopitasari, S.Farm., Apt. 2. Yunika Sary, AS.Farm, Apt.,M.Si	Dinny
26	BPOM di Palu		1. Jamaluddin, S.Si, Apt, SH 2. Novi Yanti Rahmi, S.Farm., Apt	Ronaldi
27	BPOM di Kendari		1. Dewi Amni Idrus,S.Si,Apt 2. Dra. Hasnah Nur,Apt.,MPH 3. Ratna Palupi Fajarini, S.Farm., Apt	Ronaldi
28	BPOM Gorontalo	di	1. Muindar, S.Si, M.Si, Apt 2. Triana Wati Widaningsih, S.Farm.	Dinny
29	BPOM Mamuju	di	1. Dian Muthiah Mutmainna, S.Si., Apt. 2. Sri Rahmawati.S.Farm.,Apt	Ardiyansyah
30	BPOM di Kupang		1. Frama El Lefiyana Pollo, S.Si., M.Sc., Apt 2. Rosa Endang Setiyaati, S.Farm., Apt	Yulinar
31	BPOM di Sofifi		1. Alwiah BSA.,S.Si.,Apt 2. Dwi Annisa A., S.Farm., Apt. 3. Sitti Aisyah,S.Si.,Apt	Ardiyansyah
32	BPOM di Ambon		1. Hellena Arvinda R 2. Siska Yanti,S.Si,Apt	Yulinar

33	BPOM di Manokwari	1. Hadira Yenni, S.Si., Apt. 2. Netriyuni Rozzadyah, S.Farm., Apt	Ardiyansyah
34	BPOM di Kota Tarakan	1. Reren Faiza Sasqya Ananda, S.Farm., Apt 2. Revi Fahlevi 3. Rizky Yunika Putri, S.T.P	Ronaldi
35	Loka POM di Aceh Tengah	1. Hikmah, S.Farm., Apt. 2. Pinta Veronica Gultom, S.K.M	Icha
36	Loka POM di Aceh Selatan	1. Annisa Firda Ulfah, S.K.M 2. Triana Aulia, S.T.P	Yogaswara
37	Loka POM di Tanjung Balai	1. Dewi Fahrúnisa Manurung, S.T.P 2. Tiffany Lampita Luciana Br. Sihite, S.K.M	Erika
38	Loka POM di Toba Samosir	1. Rosalina Manalu 2. Theresia Veronika, S.K.M	Christy Cecilia
39	Loka POM di Payakumbuh	1. Khairul Hamid, S.K.M 2. Mutia Khuratul Aini	Yogaswara
40	Loka POM di Dharmas Raya	1. Riflinda Zulni, S. Farm, Apt. 2. SHINTA DINI DWI SEPTA, SKM	Wiwi Hartuti
41	Loka POM di Kota Dumai	Rozalia, S.Si	Hermaniar
42	Loka POM di Kota Tanjung Pinang	1. Dian Royana, SKM 2. Muhammad Pazry, S.Si	Yulinar
43	Loka POM di Sungai Penuh	1. Annisa Alhusna, SKM 2. Bilian Sahiga Jaswatul Ikhsan 3. Rischa Mitriani, S. Farm, Apt	Christy Cecilia
44	Loka POM di Lubuk Linggau	Muhammad Ramadhon, S.Si	Yustini
45	Loka POM di Indragiri Hilir	1. Elsha Nadya Putri, S.K.M 2. Indah Dwi Mandala, S.Farm., Apt	Icha
46	Loka POM di Belitung	1. Lidya Sari Simanjuntak, S.K.M 2. Tito Dwi Christianto, S.T.P.	Yustini
47	Loka POM di Rejang Lebong	1. Isma Nurvaizah, S.Si 2. Murti Sonangda, S.TP	Ronaldi
48	Loka POM di Kab Tulangbawang	1. Nurul Isnani, S.Farm., Apt. 2. Ovi Triyulianti, S.K.M	Hermaniar

49	Loka POM di Bogor	1. Hefni Humaeda Zen.S.K.M. 2. Lu'lu'atul Khodijah, S.K.M	Ardiyansyah
50	Loka POM di Kab Tangerang	1. Kukuh Febriyanto 2. Nova Arandika	Dimmy
51	Loka POM di Tasik Malaya	1. Novia Sutopo Putri 2. Suci Tresnasari, S.K.M.	Yustini
52	Loka POM di Surakarta	1. RR. Tri Novitarini, STP 2. Singgih Dwi Cahyo, S.Farm, Apt	Christy Cecilia
53	Loka POM di Jember	1. Diana Pristawiti Novira 2. Rini Indah Setyaningsih, SKM	Christy Cecilia
54	Loka POM di Kediri	1. Dian Reni Agustina, S.Farm., Apt. 2. Dra Dyah Rochmatingrum Apt 3. Rusdiyah Fatatik	Erika
55	Loka POM di Banyumas	1. Rahmat Hidayat, S.Farm., Apt 2. Winanto., S.Si., Apt	Christy Cecilia
56	Loka POM di Sanggau	1. Ariella Lionna, S.K.M 2. Devi Yolanda Silitonga, S.Si.	Icha
57	Loka POM di Kab Kota Waringji Barat	1. Fitri Apriani 2. Nursita Galih Permatasari	Hermaniar
58	Loka POM di Kab Hulu Sungai Utara	1. Amir Rasyid, S. Pd. 2. Vrisca Geri Asa Hardian, SKM	Hermaniar
59	Loka POM di Tanah Bumbu	1. Fahmi Manarul Alam. 2. Lisna Andriani, S.Farm., Apt.	Christy Cecilia
60	Loka POM di Balikpapan	1. Nitra Wahyuningsih 2. Riskha Rinanda, S.K.M	Yogaswara
61	Loka POM Kep. Sangihe	1. Frisca Caroline Poputra, S.Farm., Apt 2. Gratia Wulan Polontoh, S.Si	Yogaswara
62	Loka POM di Banggai	1. Julian Imelda Virera, S.TP 2. Sitti Nurmaningsi Julindawati	Wiji Hartuti
63	Loka POM di Kota Palopo	1. Didimus Pasira, S.KM 2. Dwi Alliantie, S.Si., Apt	Christy Cecilia
64	Loka POM di Kota Bau-bau	1. Ila Andini Okselia, S.TP 2. Riche Riyanti Saranga, S.KM 3. Sitti Sarpiati Alwi	Hermaniar

65	Loka POM di Kep. Tanimbar	1. Indah Alfiani 2. Muhammad Nur Sigit Harianto	Yogaswara
66	Loka POM di Buleleng	1. Melissa, S.Farm., Apt. 2. Ni Nengah Sri Wahyuni	Erika
67	Loka POM di Bima	Ekky Resha Pradita, S.KM	Ronaldi
68	Loka POM di Ende	1. Dian Prahara Florentino Wara. 2. Muhammad Bintang Pamungkas, S.KM.	Wiwi Hartuti
69	Loka POM di Manggarai Barat	1. Novita Sari, S.Farm.,Apt 2. Rupaída Oktafia,S.Si,Apt	Wiwi Hartuti
70	Loka POM di Pulau Morotai	1. Mar'atus Soleha, S.TP 2. Yulica Tumaruk	Yogaswara
71	Loka POM di Sorong	1. Febril Todingan, S.KM. 2. Suparman Wahyu Sibarani	Yogaswara
72	Loka POM di Mimika	1. Irianthi Panut 2. Uliva Maya Talubun	Ronaldi
73	Loka POM di Merauke	Stella Resnita Reynold, S.Si., Apt	Wiwi Hartuti

**Tabel 3.4** Fasilitator UPT Program Badan POM Goes to School



**Gambar 3.21** Kick Off dan Training of Trainer pada tanggal 15-16 Maret 2022 di Hotel Margo, Depok

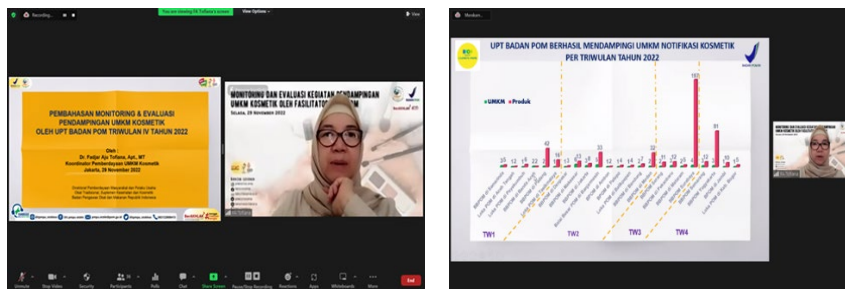
<b>Sasaran Kegiatan 4</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas UPT BPOM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, SK dan Kos</b>
<b>Indikator Kinerja Utama 2</b>	Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan pelaku usaha OT dan Kos

### 1. Monitoring dan Evaluasi Fasilitator Pendampingan UMKM Kosmetik oleh UPT BPOM

Pengembangan UMKM kosmetik menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah mengingat berbagai keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Selain perizinan, UMKM juga mengalami permasalahan terkait pemenuhan ketentuan produksi kosmetik sesuai Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Sementara itu, produksi sesuai ketentuan CPKB merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi UMKM agar kosmetik yang diedarkan dapat terjamin keamanan dan mutunya. Peran UPT BPOM sangat diperlukan untuk membantu UMKM dengan melakukan pendampingan secara berkesinambungan sampai diterbitkannya Surat Pemenuhan Aspek (SPA CPKB) yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan notifikasi produk.

Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui sejauh mana progress pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator UMKM Kosmetik di UPT setiap triwulan, dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pendampingan sehingga dapat dilakukan mitigasi dan perbaikan. Hasil pendampingan yang dilakukan oleh masing-masing UPT akan dihitung sebagai capaian output. Pada tahun 2022 telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 5 Januari 2022, 2 Juni dan 8 Juni 2022, 3-4 Oktober 2022, dan 29 November 2022, yang diikuti oleh seluruh UPT Balai POM dan diselenggarakan secara hybrid.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi pada Triwulan IV yang diikuti oleh seluruh UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM /Loka POM) di seluruh Indonesia pada tanggal 29 November 2022 diperoleh data sebagai berikut: terdapat 100 Fasilitator UPT BPOM dengan total 670 UMKM yang dibina dari 53 UPT yang melakukan pendampingan UMKM kosmetik. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Kosmetik diantaranya terkait ketersediaan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) serta dana/modal untuk melakukan renovasi denah bangunan



**Gambar 3.22** Paparan Monitoring dan Evaluasi Pendampingan UMKM Kosmetik TW IV pada tanggal 29 November 2022

## 2. Pendampingan Pelaku Usaha Obat Tradisional di Seluruh Indonesia

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik telah membentuk Fasilitator UMKM Obat Tradisional (OT) mulai tahun 2022 yang berasal dari UPT Badan POM di seluruh Indonesia. Fasilitator UMKM OT bertugas melakukan pendampingan terhadap UMKM OT, sehingga di tahun 2022 UPT telah melakukan fungsi pendampingan dan pemberdayaan UMKM. Data UMKM OT yang yang didampingi oleh UPT BPOM dan yg berhasil memenuhi standar pada tahun tahun 2022 antara lain

No	UPT BPOM	Capaian	UMKM OT
1	BBPOM di Banda Aceh	3	CV Permata Hijau Rabiah
			UD Ai-Hayah
			CV Razie Aceh
2	BBPOM di Medan	5	CV Eco Harum Wangi
			PO. LAUCIH ND PAKENTA BR SEMBIRING
			Seven Natural Indonesia
			UD Putra Putri Wijaya Lubis
			PT. MIRAKEL HERBAL ABADI
3	BBPOM di Palembang	1	Empat Tongkat Emas
4	BBPOM di Padang	2	PT. Alam Anugrah Esensi
			PT. Meniti solid sukses
5	BBPOM di Pekanbaru	1	Sari Salon
6	BBPOM di Serang	1	PT Gobosy Indonesia
7	BBPOM di DKI Jakarta	5	CV Ain Eighur
			PT Farma Mitra Alam Raharja
			CV insing Top Herbal
			Tabib Mujarab
			PT Maju Herbal Abadi
8	BBPOM di Bandung	5	CV. Herbagold,
			PT. Sahabat Umat Sehat,
			Usaha Produksi Obat Tradisional Lukas Kacaribu,
			PT. Asta Berkarya Farm,
			CV. Mitra Sukses Multi Mandiri
9	BBPOM di Semarang	5	Arlind Makinna Sejahtera,
			Maryam Essential Oils,
			CV. Yosua Mandiri Grup,
			VM Industry/ CV FEMMELIO AGRAPANA AKSATA
			Kahayang Zinergi
10	BBPOM di Yogyakarta	2	CV Herbal Revolution
			PT Elyasha Farma Utama
11	BBPOM di Surabaya	21	PT. MAHARANI ALTOMARIS SARINATURAL,
			PT. JATIM HERBAL, PERKASA,
			CV. TIRTA HERBAL SUKSES,
			CV. HERBA SEDUNIA,

			PT. Firdaus Kurnia Indah, Herbal Academy Indonesia (PT. Sunat Modern Indonesia/ SMI), Crambile Indonesia, CV. DEWA RUCI GEMILANG, PT TALIATI TELAGA TANJUNG, CV JAMU TRADISIONAL AL-QOMAR, PT TJAHAJA BARU, CV. SANTI SRI RAHAYU, UD. CITRA ALAM, JAMU DIPOWANGSIT, CV. AROMA SEHAT NUSANTARA, PT. Isykarima Herba Natura, PT. Selpasindo Pharco, Minyakku Indonesia Sukses Jaya Makmur, Tritanaya Herbaguna, PT. INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY, PT. ORINEST BERKAH NATURA
12	BBPOM di Pontianak	2	PT. Bumi Karya Husada Perusahaan Jamu Cap Kera
13	BBPOM di Palangkaraya	1	CV Bajakah Dua Putri
14	BBPOM di Banjarmasin	1	PJ Pucuk Sirih
15	BBPOM di Samarinda	5	Teh Gaharu Unna'e Herbal Al Fazza Nusa Borneo BMJ Borneo Green Mandiri Teh Senduru
16	BBPOM di Denpasar	8	UD. Alam Jaya Herbal (Ni Nyoman Noviyanti), CV. Taksu Utama Bali, Suda Lara Bali, PT. Bio Sehat Nusantara, Nasatya Herbal, Sadhutama Oil, Mawangi Alami, UD. Desoil Indonesia
17	BBPOM di Mataram	1	CV Tri Utami Jaya
18	BBPOM di Manado	1	CV. Biovina
19	BBPOM di Makassar	2	CV.Sahabat Inovasi Cemerlang CV.Albaroqah
20	Balai POM di Ambon	2	Sinar Gunung UD Kayoo
21	Balai POM di Manokwari	1	CV. Lio Art Papua
22	BBPOM di Jayapura	1	CV. Budi Mulya Asih

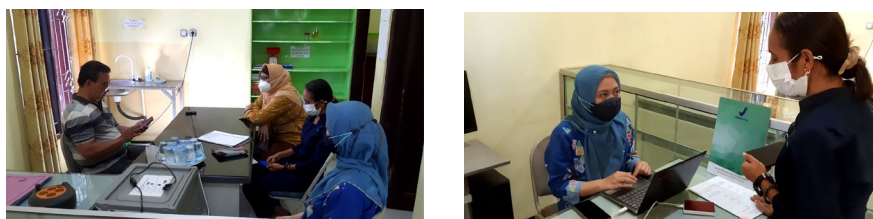
23	Loka POM di Kab. Aceh Selatan	1	Kelompok Ingin Mandiri (KIM)
24	Loka POM di Tangerang	2	CV ASH-SHIHHAH SEJAHTERA, CV Riung Gunung
25	Loka POM di Tasikmalaya	2	CV ASH-SHIHHAH SEJAHTERA, CV Riung Gunung
26	Loka POM di Kab. Bogor	1	PT Nutraceutical Biotech Indonesia
27	Loka POM di Surakarta	2	CV Tali Urip Makmur CV. TRI BUWANA WINATRA DARYA
28	Loka POM di Kab. Kediri	1	CV Cakra Surya Nusantara
29	Loka POM di Buleleng	2	Abian Jahe Taru Pramana 99
30	Loka POM di Hulu Sungai Utara	1	CV. Gula Aren Aneka Rasa
31	Loka POM di Tanah Bumbu	1	Rumah Herbal UKM
32	Loka POM di Kab. Ende	1	Minyak Gosok Nona Manis
33	Loka POM di Kab. Sanggau	1	CV TAHASUN HERBAL (Herbal Uyup B-Mas)
34	Loka POM di Merauke	1	Buminfish and Food
35	Loka POM di Baubau	1	CV Baidul Zaman Pratama

**Tabel 3.5** Data UMKM OT yang memenuhi standar tahun 2022

Dalam melakukan pemberdayaan UMKM, UPT dipantau pelaksanaannya dan jika perlu diberikan asistensi maka Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik akan melakukan kegiatan pendampingan secara langsung kepada pelaku usaha. Pendampingan secara langsung yang telah dilakukan pada tahun 2022 yaitu:

**a. Pendampingan Pelaku Usaha di Kupang, Nusa Tenggara Timur**

Direktorat PMPU OTSKK melakukan pendampingan secara *on site* ke sarana bersama dengan fasilitator OT Balai POM di Kupang. Pendampingan dilakukan di dua sarana yaitu UMKM MOERing dan Lab Herbal NTT. Pendampingan ini dalam rangka pemenuhan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) untuk mendapat Sertifikat CPOTB Bertahap (tahap 1) dan Registrasi OT.

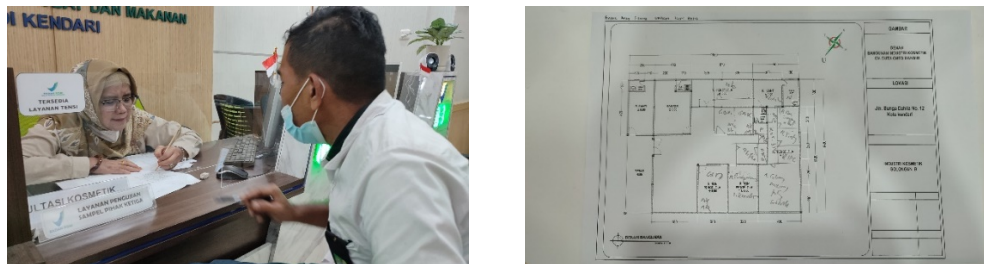


**Gambar 3.22** Pendampingan secara on site ke sarana UMKM OT di Kupang

## b. Pendampingan Pelaku Usaha di Kendari, Sulawesi Tenggara

### 1) Desk Konsultasi di Balai POM di Kendari

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik melakukan Desk konsultasi kepada pelaku usaha yang bertempat di Balai POM di Kendari pada 23 Agustus 2022. Pada kegiatan ini, Direktorat PMPU OTSKK memberikan konsultasi terkait denah bangunan sarana produksi Obat Tradisional. Pelaku usaha disupervisi secara langsung dalam mengenai denah bangunan dari sarana usahanya



Gambar 3.23 Desk konsultasi pelaku usaha Obat Tradisional di Kendari

### 2) Pendampingan secara On Site ke sarana UMKM OT

Direktorat PMPU OTSKK melakukan pendampingan secara *on site* ke sarana UMKM Srikandi di Desa Puuhopa, Kec. Puriala, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan Fasilitator OT Balai POM di Kendari pada tanggal 24 Agustus 2022. Petugas membantu pelaku usaha dalam menyusun *lay out* denah untuk area dapur yang akan digunakan untuk area pengolahan dan area non pengolahan kopi belut dengan akses terpisah dengan rumah tinggal. Penyekatan dapat dilakukan dengan partisi namun tetap menerapkan prinsip CPOTB. Selain itu, petugas juga mengarahkan untuk menambah KBLI 21022 (obat tradisional bagi manusia) melalui OSS atau PTSP setempat, mengarahkan untuk memiliki penanggung jawab Apoteker/ TTK yang sudah bekerja di fasilitas kefarmasian lain dengan kontrak penggajian berdasarkan bagi hasil omset produk, serta membantu membuat pengajuan kajian obat tradisional Kopi Belut ke Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Gambar 3.24 Pendampingan secara on site ke sarana UMKM Srikandi, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara

### c. Pendampingan Pelaku Usaha di Tanah Datar, Sumatera Utara

#### 1) Pendampingan secara On Site ke sarana UMKM OT

Direktorat PMPU OTSKK melakukan pendampingan secara *on site* ke sarana KUD Sarasah bersama dengan fasilitator OT Balai Besar POM di Padang. Para petani sereh wangi di Tanah Datar menghadapi tantangan rendahnya harga jual di pengepul sehingga pelaku usaha penyuling minyak sereh wangi berkurang. KUD Sarasah dibantu oleh Universitas Andalas untuk membuat sarana produksi penyulingan dan penjualan produk ke tangan konsumen, dengan harapan bisa meningkatkan harga jual minyak sereh wangi sekaligus meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Pelaku usaha diberikan penjelasan terkait label dan penandaan dan Prinsip CPOTB. Selain itu, pelaku usaha diminta untuk segera menyelesaikan pembangunan sarana, membuat dokumen dan mengajukan sertifikasi CPOTB tahap 1 setelah pembangunan selesai dan segera trial untuk diuji stabilitas dalam rangka pendaftaran produk



**Gambar 3.25** Pendampingan On Site ke sarana KUD Sarasah, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat,

#### 2) Mengadakan kegiatan Forum Koordinasi Pendampingan UMKM Obat Tradisional di Tanah Datar dan Sekitarnya

Direktorat PMPU OTSKK mengadakan Kegiatan Forum Koordinasi Pendampingan UMKM Obat Tradisional di Kabupaten Tanah Datar dan Sekitarnya secara luring yang diikuti oleh lintas sektor serta pelaku usaha sebanyak 55 orang. Acara dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Padang (Abdul Rahim) kemudian dilanjutkan paparan materi oleh Direktur PMPU OTSKK (Asih Liza Restanti) serta perwakilan dari Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (Imelda Ester Riana).

Paparan materi selanjutnya mengenai dukungan kemudahan perizinan persyaratan di bidang Obat Tradisional yang di sampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar (Yesrita Zedrianis) dan Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMPSTP Kabupaten Tanah Datar (Syukril Vidya

Syaukani). Kemudian dilanjutkan dengan paparan mengenai dukungan permodalan di usaha Obat Tradisional oleh Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi UKM Perindang (Andry) serta dukungan penyediaan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) sebagai penanggung jawab di Usaha Obat Tradisional oleh Ketua PAFI Cabang Kabupaten Tanah Datar (Fitriani).

Setelah itu dilakukan sesi diskusi yang dipandu oleh Kepala Balai Besar POM di Padang (Abdul Rahim) yang diikuti oleh seluruh peserta kegiatan. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik juga melakukan desk konsultasi kepada pelaku usaha yang hadir secara luring. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan solusi permasalahan perizinan yang dihadapi UMKM Obat Tradisional di Tanah Datar serta meningkatkan kemampuan UMKM dalam memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku

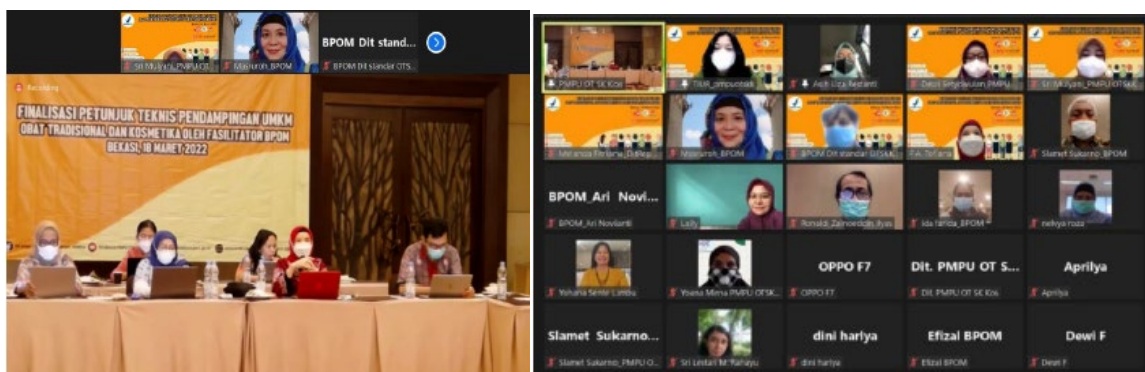


**Gambar 3.26** Kegiatan Forum Koordinasi Pendampingan UMKM Obat Tradisional di Kabupaten Tanah Datar dan Sekitarnya,

<b>Sasaran Kegiatan 4</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas UPT BPOM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, SK dan Kos</b>
<b>Indikator Kinerja Utama 3</b>	<b>Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM OT yang sesuai standard</b>

## 1. Penyusunan Petunjuk Teknis untuk Fasilitator UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dalam rangka Pendampingan UMKM Obat Tradisional

Dalam rangka memastikan produk UMKM obat tradisional dan kosmetika telah memenuhi aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu serta untuk meningkatkan daya saing produk UMKM, perlu disusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan pendampingan UMKM obat tradisional dan kosmetika, sebagai acuan agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan Fasilitator Badan POM dalam melaksanakan pendampingan kepada UMKM Obat Tradisional dan Kosmetika. Penyusunan Petunjuk Teknis untuk Fasilitator UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik melibatkan seluruh unit di Kedeputusan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Biro Hukum dan Organisasi, serta lintas sektor terkait



**Gambar 3.27** Finalisasi Petunjuk Teknis untuk Fasilitator UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik

## 2. Pelatihan Fasilitator Pendampingan UMKM Obat Tradisional

Pada tahun 2021, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik telah melakukan pendampingan ke beberapa UMKM Obat Tradisional, seperti Ambon, Palangkaraya, Kediri, Tangerang, Depok, dan Medan. Namun mulai tahun 2022 ini, pelaksanaan pendampingan UMKM dilaksanakan petugas UPT Badan POM. Direktorat PMPU OT, SK Kos berfungsi sebagai steering dan monitoring serta evaluasi. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM melakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi para petugas UPT Badan POM yang disebut “fasilitator” dalam pemahaman dan

pengetahuan terkait perizinan Obat Tradisional yang terkini agar dapat mendampingi dan memberikan solusi bagi UMKM dalam permasalahan perizinan. Materi perizinan Obat Tradisional yang akan diberikan kepada para fasilitator UPT Badan POM mencakup perizinan OSS bagi UMKM Obat Tradisional, penyusunan denah bagi UMKM Obat Tradisional, sertifikasi CPOTB bertahap terintegrasi OSS, sertifikasi dan aspek CPOTB, registrasi Obat Tradisional serta pengenalan juknis pendampingan UMKM OT.

Kegiatan ini dihadiri oleh 157 peserta yang berasal dari UPT POM di seluruh Indonesia. Bimtek kepada petugas UPT Badan POM ini bertujuan selain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas UPT Badan POM dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha Obat Tradisional sehingga dapat menghasilkan produk Obat Tradisional yang aman, bermutu dan berdaya saing



**Gambar 3.28** Pelatihan Fasilitator Pendampingan UMKM Obat Tradisional

### 3. Monitoring dan Evaluasi Pendampingan UMKM Obat Tradisional oleh Fasilitator UPT Badan POM

Mulai tahun 2022, pelaksanaan pendampingan UMKM dilaksanakan oleh fasilitator Pendampingan UMKM Obat Tradisional di masing-masing UPT Badan POM. Dalam pelaksanaan pendampingan UMKM Obat Tradisional tersebut, ditemukan kendala yang dihadapi oleh fasilitator selama proses pendampingan, meskipun para fasilitator telah dibekali pengetahuan dan kompetensi dalam Pelatihan Fasilitator di bulan Maret 2022. Oleh karena ini, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mengadakan Monitoring dan Evaluasi Pendampingan UMKM OT oleh Fasilitator UPT sebagai ajang diskusi informasi keberhasilan maupun hambatan serta upaya mencari solusi terbaik bersama dalam pelaksanaan pendampingan tahun 2022



**Gambar 3.29** Rapat Monitoring dan Evaluasi Pendampingan UMKM Obat Tradisional oleh Fasilitator UPT Badan POM

#### 4. Sharing Knowledge Orang Tua Angkat Jamu

Indonesia kaya akan biodiversity, yang sejak dulu telah digunakan dalam pengobatan, yang dikenal dengan Jamu. Jamu merupakan obat tradisional asli Indonesia yang digunakan nenek moyang kita secara turun menurun. Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi jamu, dan merasakan manfaatnya. Hal ini sebagai bukti nyata bahwa Jamu sudah merakyat di Indonesia. Pada masa pandemi, kecenderungan masyarakat untuk mengonsumsi jamu juga tambah meningkat. Namun keberadaan Jamu belum dimanfaatkan secara optimal.

Dalam pengawasan BPOM, tidak hanya pengawasan saja, namun juga melakukan pembinaan, pendampingan dan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha UMKM agar dapat menghasilkan produk yang memiliki izin edar, sehingga produk Obat tradisional dapat meningkatkan daya saing bangsa. Untuk dapat melakukan berbagai program ini, maka BPOM membuat program Orang Tua Angkat Jamu sejak tahun 2018. Salah satu kegiatan yang bersinergi dengan Orang Tua Angkat Jamu adalah kegiatan Sharing Knowledge Orang Tua Angkat Jamu yang telah diadakan sebanyak 5 (lima) kali secara hybrid dengan berbagai tema yang dibutuhkan oleh UMKM.

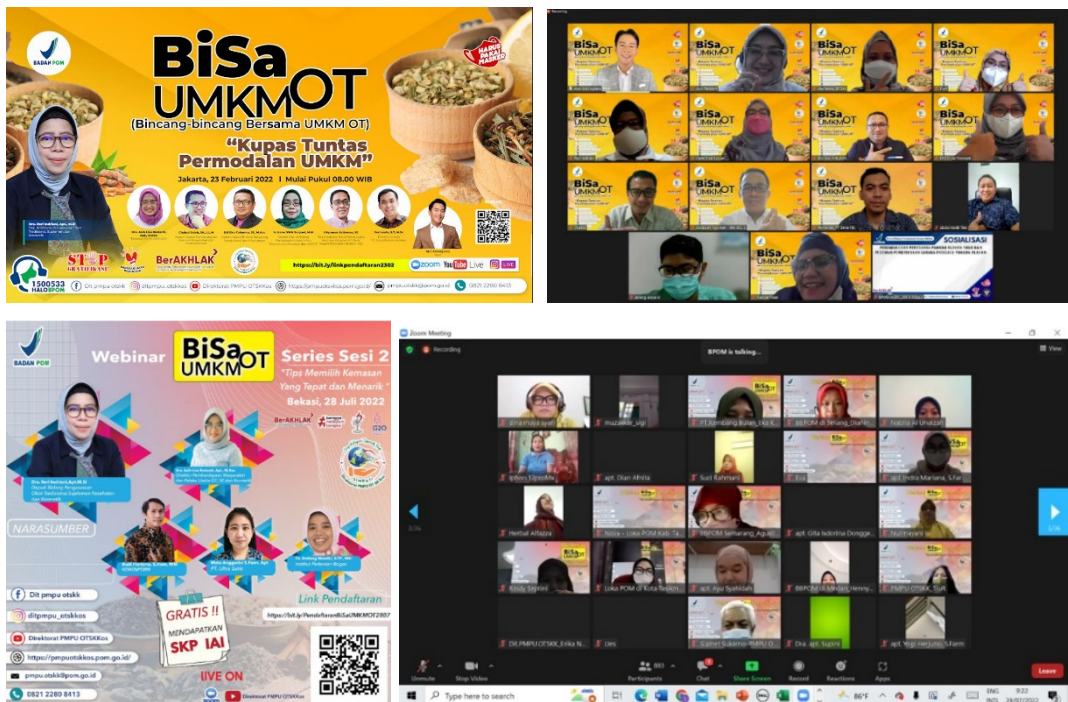


Gambar 3.30 Kegiatan Sharing Knowledge Orang Tua Angkat Sesi 1-5 yang dilaksanakan secara hybrid

## 5. Webinar BiSa UMKM (Bincang-Bincang Sama UMKM)

Obat tradisional atau yang biasa dikenal dengan jamu merupakan budaya dan jati diri bangsa Indonesia, dimana Bapak Presiden telah mengeluarkan perpres tentang peta jamu. Namun masih banyak UMKM Obat Tradisional yang mengalami kendala terkait pemenuhan aspek CPOTB, registrasi Obat Tradisional, ketersediaan bahan baku, promosi dan permodalan.

Berdasarkan hal tersebut Badan POM akan melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Tradisional dalam bentuk webinar yang berjudul BISA UMKM (Bincang-Bincang Sama UMKM) yang diadakan sebanyak 2 sesi secara *hybrid* dengan berbagai tema yang dibutuhkan oleh UMKM Obat Tradisional. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi solusi dan meningkatkan pengetahuan UMKM Obat Tradisional untuk menghadapi kendala-kendala dalam berusaha Obat Tradisional, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk Obat Tradisional.



Gambar 3.31 Kegiatan Webinar BISA UMKM Sesi 1-2 yang di laksanakan secara hybrid

## **6. Tindak Lanjut Eksplorasi Jamu sebagai Bahan Pengembangan Jamu Nusantara**

Indonesia memiliki kekayaan tanaman obat dan ramuan Jamu dari berbagai suku yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke yang merupakan kearifan lokal Jamu di seluruh wilayah Nusantara. Jamu nusantara sebagai warisan budaya perlu mendapat perhatian serius semua pihak, termasuk pemerintah.

Berdasarkan hasil penelusuran, setiap wilayah di Indonesia memiliki kekhasan kearifan lokal yang berbeda dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Penggunaan bahan kearifan lokal tersebut sebagai Jamu dilengkapi dengan data penggunaan empiris, mengingat Jamu adalah warisan leluhur bangsa yang telah dimanfaatkan secara turun temurun untuk pengobatan dan pemeliharaan kesehatan. Kearifan lokal dalam rangka pengobatan berdasarkan etnis budaya masyarakat lokal atau etnomedisin, termasuk jamu, merupakan warisan bangsa Indonesia yang bernilai tinggi, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan. Untuk mendorong kelestarian jamu nusantara, Badan POM telah melaksanakan Sarasehan Jamu Nusantara dengan tema “Jejak Empiris dengan Dukungan IPTEK Meningkatkan Daya Saing Produk Herbal Nasional” yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 2 Desember 2021. Sebagai tindak lanjut Sarasehan Jamu Nusantara, telah diterbitkan Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Nomor: HK.02.02.4.45.05.22.06 Tahun 2022 tentang Intensifikasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan oleh Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Rangka Menindaklanjuti Hasil Sarasehan Jamu Nusantara.

Surat Edaran ini menginstruksikan kepada Unit Pelaksana Teknis Badan POM (Balai Besar POM/Balai POM/Loka POM) untuk melakukan penggalian potensi keanekaragaman hayati dan bukti empirisnya, serta melakukan bimbingan teknis kepada UMKM Obat Tradisional, agar produk jamu mempunyai daya saing dalam skala nasional melalui pemenuhan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu. Indonesia memiliki wilayah kepulauan sangat luas, yang menyebabkan besarnya potensi keaneka ragaman hayati. Hal ini menjadikan tantangan tersendiri dalam pengembangan bahan kearifan lokal di Indonesia. Penelitian terkait pemanfaatan kearifan lokal sudah banyak dilakukan namun belum terinventarisir dan belum bisa dijadikan sebagai bukti penggunaan empiris.

Rangkaian kegiatan terkait Tindak Lanjut Eksplorasi Jamu sebagai Bahan Pengembangan Jamu Nusantara yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 yaitu *Focus Group Discussion* (FGD) Penggalian Informasi Empiris Bahan Alam di Seluruh Indonesia dengan Melibatkan Unsur Pentahelix, kemudian diikuti kegiatan Penggalian

Informasi Empiris Bahan Alam Berdasarkan Kearifan Lokal Dengan Melibatkan Unsur Pentahelix di beberapa titik di wilayah Indonesia yakni Medan, Makassar, Manado, serta Kendari



**Gambar 3.32** Focus Group Discussion (FGD) Penggalan Informasi Empiris Bahan Alam Di Seluruh Indonesia Dengan Melibatkan Unsur Pentahelix tanggal 16 Juni 2022



**Gambar 3.33**  
Penggalian Informasi Empiris Bahan Alam Berdasarkan Kearifan Lokal Dengan Melibatkan Unsur Pentahelix di Kota Medan, Tanggal 7 Juli 2022

**Gambar 3.34**  
Penggalian Informasi Empiris Bahan Alam Berdasarkan Kearifan Lokal Dengan Melibatkan Unsur Pentahelix di Kota Makassar, Tanggal 11 Juli 2022



**Gambar 3.35**  
Penggalian Informasi Empiris Bahan Alam Berdasarkan Kearifan Lokal Dengan Melibatkan Unsur Pentahelix di Manado, Tanggal 20 Oktober 2022

**Gambar 3.36**  
Penggalian Informasi Empiris Bahan Alam Berdasarkan Kearifan Lokal Dengan Melibatkan Unsur Pentahelix di Kota Kendari, tanggal 22 Juli 2022

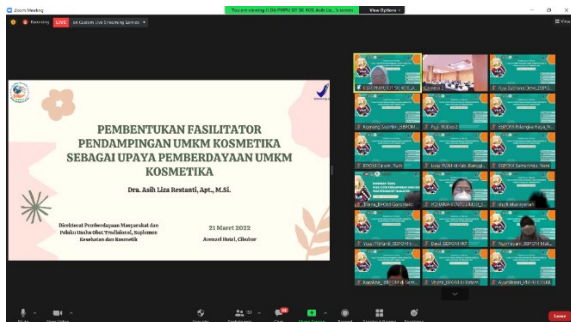
<b>Sasaran Kegiatan 4</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas UPT BPOM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, SK dan Kos</b>
<b>Indikator Kinerja Utama 4</b>	Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM Kos yang sesuai standard

### 1. Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Kosmetik kepada Petugas UPT Badan POM

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM pada Pasal 73 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik diberi amanat untuk melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, khususnya pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kepada pelaku usaha kosmetik, Kelompok Substansi Pemberdayaan UMKM Kosmetik, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik membentuk tim fasilitator pendampingan UMKM kosmetik di setiap UPT Badan POM. Tim fasilitator di setiap UPT Badan POM merupakan perpanjangan tangan Badan POM untuk mendampingi pelaku UMKM kosmetik sesuai dengan wilayah UPT Badan POM.

Bimbingan teknis yang dilaksanakan merupakan sarana persamaan persepsi, baik dari sisi regulasi dan teknis pelaksanaan pendampingan UMKM kosmetik, agar kosmetik yang dihasilkan oleh setiap pelaku UMKM kosmetik adalah aman, bermanfaat dan bermutu serta legal. Materi bimbingan teknis pendampingan UMKM kosmetik diantaranya terkait perizinan kosmetika, dimulai dari denah, penyusunan dokumentasi cara pembuatan kosmetika yang baik (CPKB) sampai kepada penerbitan nomor notifikasi kosmetika. Kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Kosmetik telah dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 21-22 Maret 2022 di Cibubur, Bekasi.



**Gambar 3.37** Paparan materi dari Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos



**Gambar 3.38** Peserta Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Kosmetik yang hadir secara luring

## 2. Pembahasan Rancangan MoU Badan POM dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka upaya bersama Badan POM dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendorong hilirisasi produk bahan alam/ biota laut sebagai produk Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan pangan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menginisiasi adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun ruang lingkup MoU meliputi Pembinaan pelaku usaha hasil biota laut, Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu, manfaat dan daya saing produk hasil biota laut, Pertukaran data dan/atau informasi, Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka peningkatan daya saing, kegiatan lain yang disepakati oleh Badan POM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pembahasan usulan MoU dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2022 yang dilaksanakan secara hybrid di Bekasi, dihadiri oleh perwakilan dari Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi, serta perwakilan dari Kedeputian 1, 2 dan 3. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2022 dilakukan rapat pembahasan draft MoU antara Badan POM dengan KKP secara luring di Jakarta. Rapat ini dihadoro oleh Kementreian Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan dari Badan POM Pusat, yati Biro Hukum dan Organisasi, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.



**Gambar 3.39.** Pembahasan usulan Draft MoU Badan POM dengan KKP di Bekasi



**Gambar 3.40.** Pembahasan lanjutan Draft MoU Badan POM dengan KKP di Jakarta

<b>Sasaran Kegiatan 5</b>	<b>Meningkatnya pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos</b>
<b>Indikator Kinerja Utama 1</b>	Tingkat efektivitas KIE OT, Kos dan SK

## 1. KIE Pemberdayaan Masyarakat terkait Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

KIE yang dilaksanakan dengan mitra Badan POM yaitu anggota Komisi IX DPR RI merupakan kegiatan berkelanjutan yang dilaksanakan rutin setiap tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat sehingga diharapkan bisa menjadi *Agent of Change* untuk lingkungan terdekatnya. Atas dasar tersebut, materi KIE yang disampaikan kepada peserta adalah Penggunaan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Aman.

Tahun 2022 kegiatan KIE bersama TOMAS dilaksanakan bersama dua TOMAS yaitu Hj. Nur Nadlifah, S.Ag., M.Ag. di daerah Brebes dan Tegal dan Drs. H. Ibnu Multazam di daerah Ponorogo dengan rincian terlampir:

### A. Tokoh masyarakat Hj. Nur Nadlifah, S.Ag.,M.M.

No	Tanggal Pelaksanaan KIE	Lokasi KIE	Jumlah Peserta
1.	12 Mei 2022	Bumiayu, Brebes	250 orang
2.	15 Mei 2022	Jatibarang, Brebes	250 orang
3.	16 Mei 2022	Brebes, Brebes	250 orang
4.	21 Juni 2022	Kedungbanteng, Tegal	250 orang
5.	30 Juli 2022	Wanasari, Brebes	250 orang
6.	14 Agustus 2022	Wanasari, Brebes	250 orang
7.	25 September 2022	Paguyangan, Brebes	250 orang
8.	25 September 2022	Paguyangan, Brebes	250 orang
9.	16 Oktober 2022	Tonjong, Brebes	250 orang
10.	21 Oktober 2022	Bumiayu, Brebes	250 orang

### B. Tokoh masyarakat Drs. H. Ibnu Multazam

No	Tanggal Pelaksanaan KIE	Lokasi KIE	Jumlah Peserta
1.	31 Oktober 2022	Ponorogo, Ponorogo	250 orang

### C. Tokoh masyarakat Emanuel Melkiades Laka Lena

No	Tanggal Pelaksanaan KIE	Lokasi KIE	Jumlah Peserta
1.	2 November 2022	Timor Tengah Utara, NTT	250 orang
2.	3 November 2022	Rote Ndao, NTT	250 orang



Gambar 3.41 Kegiatan KIE Tomas

<b>Sasaran Kegiatan 5</b>	<b>Meningkatnya pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos</b>
<b>Indikator Kinerja Utama 2</b>	Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang dilayani. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, sudah tentunya suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya, dan yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka.

Untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, maka Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (PMPU OTSKK) melakukan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun aspek yang harus dimiliki oleh penyelenggara pelayanan publik adalah:

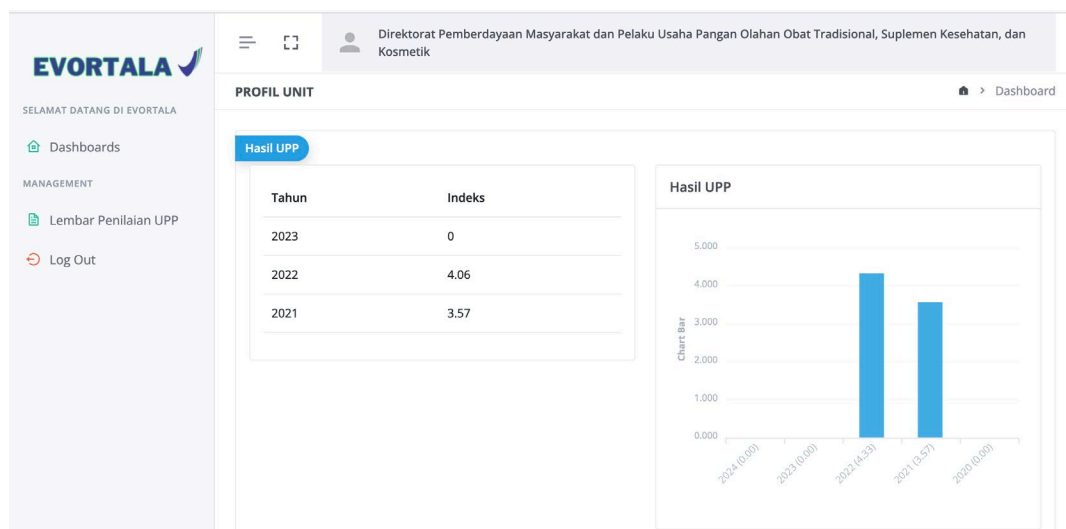
- Stander Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM
- Profesionalisme SDM
- Sarana dan Prasarana
- Sistem Informasi Pelayanan Publik
- Konsultasi dan Pengaduan
- Inovasi

Direktorat PMPU OTSKK telah memiliki standar pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.02.02.45.451.06.22.126 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Standar pelayanan ini juga telah di riview bersama stake holder yaitu, tokoh masyarakat, akademisi, LSM dan institusi lain dan juga telah melibatkan hasil survei kepuasan masyarakat dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik. Kegiatan review dan perbaikan standar pelayanan bertujuan untuk memetakan pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tujuan memberikan langkah-langkah rekomendasi dan rencana aksi kedepan. Forum Konsultasi Publik dilakukan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2022.

Selama tahun 2022, Direktorat PMPU OTSKK telah melakukan pelayanan publik berupa Konsultasi Masyarakat dan Pendampingan Pelaku Usaha Dalam Memenuhi Standar di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik diberikan kepada 193 (seratus sembilan puluh tiga) masyarakat/calon pelaku usaha/pelaku usaha UMKM (OT/Kos).

Guna meningkatkan pelayanan publik, Direktorat PMPU OTSKK telah melakukan Inovasi Pelayanan Publik berupa penerbitan infografis secara berkala selama tahun 2022 yaitu Sesuk (Senin Suplemen Kesehatan), Ramu (Rabu Jamu), dan Ketik (Kamis Kosmetik). Infografis ini berisi informasi terkait perizinan, khasiat/manfaat, efek samping, larangan terkait produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Selama tahun 2022 telah terbit sekitar 150 (seratus lima puluh) infografis.

Pada bulan Juni 2022, juga telah dilakukan penilaian Unit Pelaksana Pelayanan Publik oleh inspektorat dan Biro Hukor terhadap pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK. Direktorat PMPU OTSKK mendapat nilai indeks UPP tahun 2022 adalah 4,06 (kategori sangat baik) meningkat 0.49 poin dari tahun 2021. Indeks ini diatas target yang telah ditetapkan yaitu 4,01.



**Gambar 3.42** Penilaian UPP Dit. PMPU OTSKK Tahun 2022

<b>Sasaran Kegiatan 6</b>	<b>Meningkatnya pemberdayaan Pemda dan masyarakat dalam program keamanan OT,SK, dan Kos</b>
<b>Indikator Kinerja Utama 1</b>	Jumlah komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos

**1. Sinergitas bersama Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Profesi di Daerah dalam rangka Pembentukan Penyuluh/Kader Daerah OT, SK, dan Kosmetik Aman melalui Program Badan POM Goes to Community**

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilar dari system pengawasan Badan POM sebagai bentuk partisipasi masyarakat dengan program pemerintah. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk komunitas akan mempercepat dan mempermudah perluasan pengawasan Badan POM di dalam mewujudkan masyarakat yang sadar tentang keamanan dan manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Penyuluh keamanan dan khasiat/kemanfaatan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, and Kosmetik kepada masing-masing individu merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis *community knowledge*. Agar penyuluhan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, perlu dibentuk Kader Daerah Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Aman melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis. Dengan adanya Kader Daerah, diharapkan dapat membantu kapasitas individu di masyarakat dalam meningkatkan kesadaran untuk memilih dan menggunakan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, serta berperan sebagai perantara atau penghubung antara Badan POM dan Unit Pelaksana Teknisnya dengan komunitas masyarakat

Guna mencapai maksud tersebut, perlu ada sinergisme bersama antara Badan POM dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Profesi terkait di dalam pemilihan, pembentukan, dan pemberdayaan Penyuluh/Kader keamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik di dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih produk yang aman dan bebas dari bahan berbahaya di seluruh Indonesia

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen kesehatan, dan Kosmetik melaksanakan Kegiatan Sinergitas bersama Organisasi Sosial

Kemasyarakatan dan Profesi di Daerah dalam rangka Pembentukan Penyuluh/Kader Daerah OT, SK, dan Kosmetik Aman melalui Program Badan POM Goes to Community. Kegiatan ini diadakan pada tanggal 30 – 31 Mei 2022 di Gumaya Tower Hotel, Semarang. Sebagai Calon Kader/Penyuluh di ruang lingkup Provinsi Jawa Tengah, peserta kegiatan mendapatkan berbagai materi terkait pengawasan Obat dan Makanan yang dipaparkan oleh berbagai narasumber dan pakar di bidangnya. Di akhir kegiatan, peserta melaksanakan *post-test* sebagai dasar penetapan kelulusan Penyuluh Daerah OT, SK, dan Kosmetik Aman.

Atas pelaksanaan kegiatan ini, telah terbentuk Penyuluh Daerah/Wilayah Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Aman sebanyak 33 orang dari 16 Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi. Hal ini diharapkan dapat membangun sinergitas dengan Lintas Sektor di daerah sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam memilih dan menggunakan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman



Gambar 3.43 Sinergitas bersama Orsosmas dan Profesi di Semarang

<b>Sasaran Kegiatan 7</b>	<b>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal</b>
<b>Indikator Kinerja Utama 1</b>	<b>Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos</b>

**1. Internalisasi Meraih WBK/WBBM di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Sebagai salah satu unit pelayanan publik, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Upaya peningkatan tersebut diwujudkan dengan memberikan inovasi layanan publik, melakukan perbaikan berdasarkan saran pengguna layanan publik, melakukan pembekalan kepada petugas layanan publik, serta membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM). Atas dasar tersebut, maka dilaksanakan kegiatan Internalisasi Meraih WBK/WBBM di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Kegiatan ini mengundang narasumber dari Kemenpan RB yang memberikan paparan seputar Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Dalam paparannya, narasumber menjelaskan aspek-aspek penting dalam penilaian Evaluasi ZI/WBK/WBBM yang perlu diperhatikan oleh setiap Pokja dalam suatu unit kerja. Materi tersebut mendapat respon positif serta meningkatkan engagement peserta dalam berusaha meraih WBK/WBBM di unit kerja masing-masing

Diharapkan melalui kegiatan ini, peserta dapat mengetahui lebih dalam tentang aspek-aspek dalam penilaian evaluasi ZI/WBK/WBBM dan termotivasi untuk menciptakan pelayanan publik prima di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan ASN yang berakhlak.



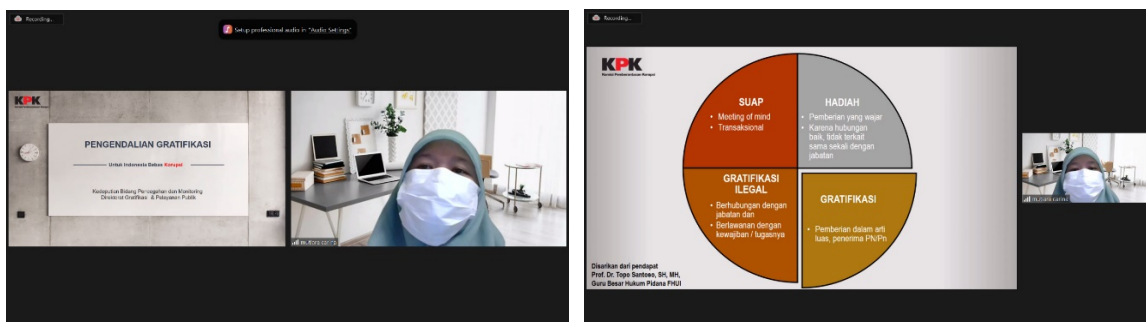
**Gambar 3.44** Internalisasi Meraih WBK/WBBM di Dit. PMPU OTSKK

## 2. Sosialisasi Anti Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sebagai bentuk penegakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi. Acara ini diinisiasi oleh Pokja Penguatan Pengawasan dengan mengundang peserta di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Acara diawali dengan sambutan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta Ketua Pokja Penguatan Pengawasan. Memasuki acara inti adalah Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi oleh narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peserta menyimak materi dengan saksama dan aktif bertanya kepada narasumber pada sesi tanya jawab yang dibuka di akhir acara.

Kegiatan Sosialisasi Anti Gratifikasi diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang juga memiliki tugas sebagai petugas pelayanan publik. Dengan diadakannya acara ini diharapkan peserta dapat berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, termasuk gratifikasi, di ruang lingkup instansi pemerintahan.



Gambar 3.45 Sosialisasi Anti Gratifikasi di Dit. PMPU OTSKK

<b>Sasaran Kegiatan 8</b>	<b>Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang berkinerja optimal</b>
<b>Indikator Kinerja Utama 1</b>	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos

## 1. Pengembangan Kompetensi SDM di Direktorat PMPU OT, SK, Kos

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN

Standar profesionalitas ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Setiap dimensi mencakup bobot, deskripsi, dan indikator. Peningkatan profesionalitas ASN akan mendorong keberhasilan Reformasi Birokrasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik melakukan pengembangan profesionalitas SDM dengan berbagai cara, salah satunya yaitu pengembangan manajemen talenta berdasarkan kompetensi dan tingkat pendidikan sehingga dapat terwujud SDM yang berintegritas tinggi, profesional, dan kompeten. Oleh sebab itu, demi terwujudnya sasaran kegiatan tersebut, Direktorat secara optimal melakukan perbaikan berkelanjutan melalui kegiatan yang dilakukan, antara lain

### a. Kegiatan *Leadership Communication Thru Public Speaking*

Sebagai salah satu softskill yang perlu dikuasai oleh petugas pelayanan publik, pegawai di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mengikuti Kegiatan *Leadership Communication Thru Public Speaking*. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2022 ini menghadirkan narasumber Linda Nur Lestari dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang *public speaking*.

### b. Pelatihan Kompetensi Teknis Manajemen ASN Jenjang Pelaksana/Setara

Pelatihan Kompetensi Teknis Manajemen ASN Jenjang Pelaksana/Setara dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 4 – 7 Juli 2022 di Bogor. Acara ini diikuti oleh para Analais Kepegawaian dari berbagai Kementerian/Lembaga dengan materi pelatihan sesuai tugas dan jabatannya. Materi tersebut antara lain tata cara penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja, penegakan disiplin dan hukuman ASN, kenaikan pangkat PNS, pensiun PNS, dll.

c. Pelatihan ISO 9001:2015

Dalam rangka peningkatan kompetensi sebagai persyaratan untuk menjadi auditor internal, pegawai Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mengikuti Pelatihan ISO 9001:2015

d. Pelatihan Intensif Menulis Laporan Efektif

Pelatihan Intensif Menulis Laporan Efektif dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 Desember 2022 oleh PPSDM Badan POM bekerja sama dengan Tempo Institute. Pada pelatihan ini, peserta mendapatkan materi dan pengalaman seputar penulisan laporan efektif. Peserta juga mempraktikkan materi yang ada sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta training dalam membuat Laporan Efektif yang baik

e. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rangka peningkatan Pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai ketentuan dan akuntabel, di tahun 2022 ada tiga pegawai yang mengikuti Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa di PPM Manajemen yang bekerja sama dengan LKPP

f. *Capacity Building* di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

*Capacity Building* dilaksanakan sebagai bentuk pembangunan SDM dalam transformasi manajemen SDM aparatur menuju birokrasi berkelas dunia. Dalam kegiatan ini, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengundang narasumber dari Kemenpan-RB yang menyampaikan materi terkait Penguatan Budaya Kerja BERAKHLAK & *Employer Branding* Bangsa Melayani Bangsa



Gambar 3.46 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai

<b>Sasaran Kegiatan 9</b>	<b>Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos</b>
<b>Indikator Kinerja Utama 1</b>	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal

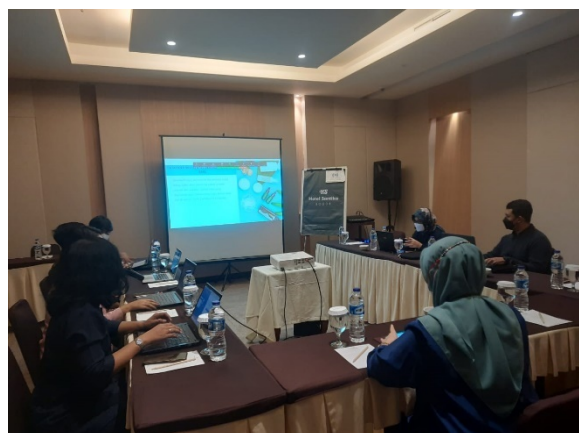
## 1. Evaluasi Program Kerja

Evaluasi program kerja merupakan kegiatan yang mendukung kegiatan direktorat dalam melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Pada kegiatan ini membahas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan merencanakan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.

## 2. Pembuatan Aplikasi E-CPKB dalam rangka Digitalisasi Perizinan Kosmetik

Pengembangan UMKM kosmetik menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah mengingat berbagai keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Tidak sedikit pelaku usaha UMKM kosmetik mengalami kendala mulai dari awal memulai usaha, antara lain kendala perizinan terkait usaha, perizinan terkait produksi hingga perizinan untuk mengedarkan kosmetik. Selain perizinan, kendala lainnya terkait pemenuhan ketentuan produksi kosmetik sesuai Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Adapun 2 (dua) aspek CPKB yang harus dipenuhi UMKM Kosmetik, atau industri kosmetik golongan B, adalah Higiene Sanitasi dan Dokumentasi.

Dalam upaya memberikan solusi bagi pelaku usaha UMKM kosmetik terkait Dokumentasi CPKB, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik membangun suatu aplikasi yang dinamakan E-CPKB, dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mendokumentasikan dokumen terkait pembuatan kosmetik dalam bentuk digital, serta bagi auditor dalam melaksanakan audit CPKB. Aplikasi ini mulai dibangun sejak awal tahun 2022, dan telah selesai pada bulan Mei 2022. Pelaksanaan Uji Coba *System Integration Testing* (SIT) bersama dengan tim dari Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) telah dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2022 di Bogor, dan dilanjutkan dengan validasi aplikasi melalui *User Acceptance Testing* (UAT) pada tanggal 20 September 2022 di Mataram. Sosialisasi penggunaan aplikasi E-CPKB akan dilaksanakan pada tahun 2023



**Gambar 3.47** Pelaksanaan *System Integration Testing* (SIT) pada tanggal 15 Agustus 2022 di Bogor



Gambar 3.48. User Acceptance Testing (UAT) pada tanggal 20 September 2022 di Mataram

<b>Sasaran Kegiatan 10</b>	<b>Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos secara Akuntabel</b>
<b>Indikator Kinerja Utama 1</b>	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos

### **1. Sewa Rumah Dinas Jabatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha**

Perencanaan pengadaan langsung Jasa Sewa Rumah Dinas Jabatan Direktorat PMPU OT SK dan Kosmetik tahun 2022 dilakukan dengan melihat keadaan direktur yang berasal dari luar Jakarta dan domisili di luar Jakarta sehingga memerlukan rumah atau tempat tinggal di Jakarta sehingga dilakukan Sewa Rumah Dinas Jabatan. Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Rumah Dinas adalah bangunan gedung beserta kelengkapannya untuk tempat tinggal bagi pejabat tertentu dalam masa tertentu. Badan POM tidak punya rumah dinas sehingga perlu dilakukan sewa. Mengingat di tengah kota Jakarta agak susah mendapat rumah sehingga dilakukan mencari apartemen sebagai sewa rumah dinas jabatan. Sewa rumah dinas jabatan dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan.

### **2. Layanan Perkantoran Direktorat PMPU OT, SK, Kos**

Layanan Perkantoran digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari pada Direktorat PMPU Obat Tradisional, SK dan Kosmetik yang menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar dapat memberikan pelayanan secara optimal, seperti barang cetak, air minum pegawai.

### **3. Pemeliharaan kendaraan operasional Direktorat Pengawasan OT dan SK**

Setiap kendaraan memerlukan perawatan untuk menjaga performance dari kendaraan tersebut. Terbatasnya anggaran dari Biro Umum, maka unit juga mempersiapkan anggaran untuk pemeliharaan kendaraan operasional.

Kendaraan yang terdiri dari :

- Satu Kendaraan dinas yang digunakan Direktur
- Satu Kendaraan operasional yang digunakan untuk operasional

### **4. Honor Pramubakti Direktorat PMPU OT, SK, Kos**

Biro Umum hanya mengakomodir 7 (tujuh) orang honor pramubakti, padahal masih dibutuhkan 1 (satu) orang pramubakti untuk membantu terkait pengelola keuangan dan arsiparis. Sehingga kegiatan ini mengakomodir honor pramubakti 1 (satu) orang selama 12 (dua belas) bulan dengan 1 (satu) kali THR

#### **5. Penanganan Pandemi Covid-19 Di Direktorat PMPU OT, SK, Kos**

Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Direktorat PMPU OT, SK, Kos untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hal tersebut maka pegawai di Dit PMPU OT SK Kos perlu dibekali dengan penambah daya tahan tubuh dan masker serta pemeriksaan awal terhadap covid 19 bila ada gejala ataupun terpapar (tes swab PCR/antigen) bahkan penanganan isolasi mandiri di suatu tempat (hotel) bila diperlukan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pada tahun 2022, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai dengan perencanaan, menggunakan anggaran dengan tepat, dan pencapaian kinerja yang melebihi target dengan realisasi anggaran pada TA 2022 sebesar 99,93%

Sebagai unit kerja dengan tupoksi utama di bidang pemberdayaan dan pendampingan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha. Tingkat Efektivitas KIE OT, Kos, dan SK pada tahun 2022 berada di nilai 95,7 (sangat efektif sekali)

### **B. Saran**

Sebagai unit baru, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik perlu usaha dalam meningkatkan kinerjanya sehingga dapat tercapai target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya. Usaha tersebut dapat terwujud dengan:

- Meningkatkan komitmen yang kuat dari pimpinan hingga seluruh pegawai yang terlibat sehingga mampu mengidentifikasi kendala agar tidak mengganggu pencapaian target yang ditetapkan serta terus menjaga komitmen janji layanan
- Meningkatkan kompetensi SDM dengan pelatihan-pelatihan serta penugasan.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

## Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	6385 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				10.823.607.000	10.816.197.739	99,93%
2	6385.BDC.001 Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	274	277	101,09%	5.419.052.000	5.417.091.738	99,96%
3	6385.BDC.002 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan Kos yang sesuai standar	163	171	104,91%	5.404.555.000	5.399.106.001	99,90%

Lampiran 2

Capaian Kinerja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Tahunan	Satuan	Volume				Anggaran			
						Target	Realisasi	Capaian berdasar target bulan Desember	Capaian berdasar target tahunan	Pagu	Realisasi	Capaian	
<b>STAKEHOLDER PERSPEKTIF</b>													
1	SK1	Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang prima	IKK1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos (target 80%)	82	Indeks	82	92,4	112,68%	112,68%	190.086.000	190.084.189	100,00%
2	SK2	Meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos	IKK2.1	Persentase Pemda yang menerapkan program keamanan OT, SK dan Kos	50	Persen	50	83,33	166,66%	166,66%	651.280.357	651.278.596	100,00%
			IKK2.2	Persentase duta yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat	84	Persen	84	101,09	120,35%	120,35%	154.252.857	154.252.603	100,00%
No	SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Tahunan	Satuan	Volume				Anggaran			
<b>INTERNAL PROSES PERSPEKTIF</b>													
3	SK3	Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, SK, dan Kos	IKK3.1	Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK	76	Persen	76	80,00	105,26%	105,26%	497.027.500	497.025.994	100,00%
			IKK3.2	Persentase pemda yang diintervensi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan OT, SK, dan Kos	50	Persen	50	87,5	175,00%	175,00%	154.252.857	154.252.603	100,00%
No	SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Tahunan	Satuan	Volume				Anggaran			
4	SK4	Meningkatnya Kapasitas UPT BPOM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, SK dan Kos	IKK4.1	Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan masyarakat	60	Persen	60	100,00	166,67%	166,67%	154.252.857	154.252.603	100,00%
			IKK4.2	Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan pelaku usaha OT dan Kos	60	Persen	60	93,75	156,25%	156,25%	154.252.857	154.252.603	100,00%
			IKK4.3	Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM OT yang sesuai standard	95	Persen	95	101,45	106,79%	106,79%	1.448.083.500	1.448.074.537	100,00%
			IKK4.4	Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM Kos yang sesuai standard	95	Persen	95	107,45	113,11%	113,11%	515.393.500	515.391.941	100,00%
No	SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Tahunan	Satuan	Volume				Anggaran			
5	SK5	Meningkatnya pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos	IKK5.1	Tingkat efektivitas KIE OT, Kos dan SK	94,19	Nilai	94,19	95,7	101,60%	101,60%	3.517.874.357	3.512.440.637	99,85%
			IKK5.2	Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	4,01	Indeks	274	4,06	1,48%	101,25%	1.489.710.500	1.489.704.994	100,00%
6	SK6	Meningkatnya pemberdayaan Pemda dan masyarakat dalam program keamanan OT, SK, dan Kos	IKK6.1	Jumlah komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	274	Jumlah	274	277	101,09%	101,09%	154.252.858	154.252.603	100,00%
No	SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Tahunan	Satuan	Volume				Anggaran			
<b>Learning and Growth Perspective</b>													
7	SK7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	IKK7.1	Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	81	Indeks	81	88,14	108,81%	108,81%	110.588.000	108.641.272	98,24%
8	SK8	Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang berkinerja optimal	IKK8.1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	80	Indeks	80	86,97	108,71%	108,71%	403.989.000	403.987.910	100,00%

No	SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Tahunan	Satuan	Volume				Anggaran			
						Target	Realisasi	Capaian berdasar target bulan Desember	Capaian berdasar target tahunan	Pagu	Realisasi	Capaian	
9	SK9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	IKK9.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	2,1	Indeks	2,1	3	142,86%	142,86%	443.434.000	443.432.032	100,00%
10	SK10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos secara Akuntabel	IKK10.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	99	Persen	99	64,33%	0,65%	0,65%	784.676.000	784.672.622	100,00%

## Lampiran 3

## Hasil pemantauan peningkatan kompetensi minimal 20 JP pegawai tahun 2022

No	Nama Lengkap	Total Jam Pelajaran
1	Dra. Asih Liza Restanti, Apt, M.Kes	34
2	Ardiyansyah Kahuripan, S.Si, Apt,M.Si	41
3	Dr. Fadjar Aju Tofiana, Apt, MT	26
4	Widha Dianasari, S.Si, Apt,. M.K.M.	26
5	Dinny Anggraini, S.Si, Apt.	26
6	Yulinar, SKM, M.Si	38
7	Ida Farida, S.Si, Apt	23
8	Ari Novianti Nugroho Basuki, SP	23
9	Widihastuti, S.Farm, Apt	54
10	Yoana Mirna, S.Si, Apt	20
11	Pulan Widyanati, S.Si, Apt ,M.Si	42
12	Drs. Ronaldi Zainoeddin Ilyas, Apt	37
13	Drs. Slamet Sukarno, Apt, MP	91
14	Yustina Muliani Budijanto, S.Si, Apt, M.Si	105
15	Dra. Yohana Sente Limbu, Apt	33
16	Ambar Setyorini, S.Si, Apt	52
17	Dra. Sri Mulyani, Apt	37
18	Fitria Rahmi, S.Farm, Apt, M.Sc	26
19	Wiwi Hartuti, S.Farm, Apt, M. Si.	88
20	Dewi Setyowulan, S.Si, Apt	31
21	Sri Lestari Mukti Rahayu, S.Sos	33
22	Mastiur Hutagaol, S.Si	41
23	Erika Nurhayati Panjaitan, SE	36
24	Rona Monika Sihaloho, S.Si	TUBEL
25	Ester Junita Sinaga, S. Farm, Apt	54
26	Hermaniar, S.Farm., Apt.	35
27	Yogaswara Tawang Gumbara, S.Farm, Apt	17
28	Naisah Pide	20
29	Christy Cecilia Sinaga, S.Farm., Apt.	37
30	Shofi Atus Syariah, S.E	23
31	Dita Yustine Winda Ningrum, S.Si	19
32	Widya Cahyaning tyas Hardiyani, A Md	TUBEL
33	Widyana Siregar, S.K.M	21
34	Endah Fitri Untari, S.M	47
35	Rahadiyan Nur Widiawan, S.Gz.□	29
36	Febriana Savitri, S.K.M□	26
37	Amatulloh Wajihah, S.Si□	24
38	Erlita Mustikaningtyas, A.Md.Kb.N	17
39	Naufal Zuhdi Irshadi, A.Md.Ak.□	77
40	Desti Apriliyani, A.Md.Ak.	17

## Lampiran 4

Rekap Barang Milik Negara  
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  
Tahun 2022

Kode Barang	Nama Barang	No. Urut Pendaftaran	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Satuan Barang
3.10.01.02.002	Laptop	218	DELL Inspiron 5406 (core i7-1165G7 - Gray	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	285	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	286	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	287	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	288	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.02.03.003	Printer	335	HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One [CZ992A]	2021	1	Buah
3.10.01.01.007	PC	76	AIO LENOVO 3 24ITL6- A0ID CI7- 1165G7/2X4GB/512GB/MX4 50 2GB/DVD/23.8/WIN10+OHS/ BLACK	2021	1	Buah
3.10.02.03.004	Scanner	44	EPSON Portable Business Scanner Wi-Fi DS-360W	2021	1	Buah
3.05.01.05.048	LCD Projector	23	INFOCUS Projector IN114XV	2021	1	Buah
3.06.01.02.165	Camera Conference	3	Logitech Group	2021	1	Buah
3.06.01.02.128	Kamera	18	Canon	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	219	DELL Inspiron 5406 (core i7-1165G7 - Gray	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	222	DELL Inspiron 5406 (core i7-1165G7 - Gray	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	223	DELL Inspiron 5406 (core i7-1165G7 - Gray	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	224	DELL Inspiron 5406 (core i7-1165G7 - Gray	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	225	DELL Inspiron 5406 (core i7-1165G7 - Gray	2021	1	Buah

3.10.01.01.007	PC	77	AIO LENOVO 3 24ITL6-A0ID CI7-1165G7/2X4GB/512GB/MX4 50 2GB/DVD/23.8/WIN10+OHS/BLACK	2021	1	Buah
3.10.02.03.004	Scanner	55	ADS 1700 W	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	281	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	282	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	283	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	284	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	226	DELL Inspiron 5406 (core i7-1165G7 - Gray	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	227	DELL Inspiron 5406 (core i7-1165G7 - Gray	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	289	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	290	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	291	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	292	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	293	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.02.03.003	Printer	337	HP Smart Tank 515 All-in-One Printer	2021	1	Buah
3.10.02.03.003	Printer	338	HP OfficeJet 250 Mobile AIO	2021	1	Buah
3.10.02.03.004	Scanner	57	ADS 1700 W	2021	1	Buah
3.10.02.03.003	Printer	336	HP Smart Tank 515 All-in-One Printer	2021	1	Buah
3.10.02.03.003	Printer	339	HP OfficeJet 250 Mobile AIO	2021	1	Buah
3.10.02.03.004	Scanner	56	ADS 1700 W	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	294	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	295	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	296	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	297	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	298	Asus P2451FB	2021	1	Buah

3.10.01.02.002	Laptop	299	Asus P2451FB	2021	1	Buah
3.10.02.03.003	Printer	344	Canon G5070	2022	1	Buah
3.10.02.03.003	Printer	345	Canon G5070	2022	1	Buah
3.10.02.03.003	Printer	346	Canon G5070	2022	1	Buah
3.10.02.03.004	Scanner	58	Brother Scanner Dokumen ADS-2700W	2022	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	312	Asus P2451FB	2022	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	313	Asus P2451FB	2022	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	314	Asus P2451FB	2022	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	315	Asus P2451FB	2022	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	316	Asus P2451FB	2022	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	317	Asus P2451FB	2022	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	318	Asus P2451FB	2022	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	319	Asus P2451FB	2022	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	320	Asus P2451FB	2022	1	Buah
3.10.01.02.002	Laptop	321	Asus P2451FB	2022	1	Buah
8.01.01.01.001	Software	98	Aplikasi CPKB	2022	1	Buah